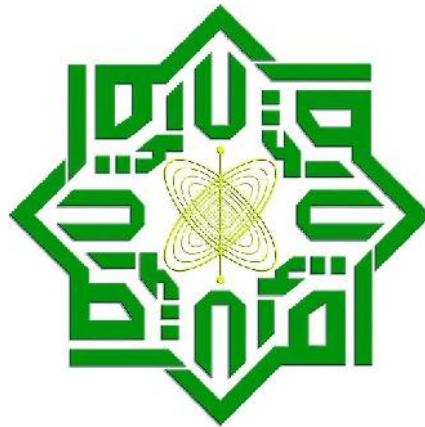


# **SKRIPSI**

## **ANALISIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA KERINCI KIRI KECAMATAN KERINCI KANAN KABUPATEN SIAK**

*Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat guna memperoleh  
Gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



Oleh:

**MEGA MUSTIKA**  
**NIM.10875004436**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2012**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA KERINCI KIRI KECAMATAN KERINCI KANAN KABUPATEN SIAK**

Oleh:

**MEGA MUSTIKA**  
**NIM. 10875004436**

*Penelitian Ini Dilakukan di Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu dikarenakan tidak terealisasinya beberapa pembangunan yang sudah direncanakan, hal ini dapat dilihat diantaranya pada pengerasan jalan, pengaspalan jalan poros desa, pos penimbangan bayi, pembangunan gedung SD, dan pembangunan gapura desa, ini disebabkan masih kurangnya penentuan lokasi pada pembangunan, kurangnya transparansi pada biaya yang digunakan, dan pada keterlibatan masyarakat dalam perencanaan.*

*Dalam penelitian ini, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak dilihat berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 38 Tahun 2011 tentang Specific Block Grant yaitu ketepatan sasaran, manajemen kegiatan, dan partisipasi masyarakat.*

*Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi, questioner, dan wawancara. Responden dalam penelitian ini berjumlah 87 orang. Kemudian teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data yang telah terkumpul, ditabulasikan menurut jenis data, dan memberi keterangan dengan mengaitkan dengan teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada dan memberi interpretasi terhadap hasil yang relevan yang kemudian diambil kesimpulan dan saran.*

*Dari hasil pengukuran terhadap masing-masing indikator, maka dapat dinyatakan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak dinyatakan dalam kategori kurang baik. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya penentuan lokasi pada pembangunan, kurangnya transparansi pada biaya yang digunakan, dan pada keterlibatan masyarakat dalam perencanaan. Oleh sebab itu penulis menyarankan agar dalam pembangunan harus bisa menentukan ketepatan sasaran dengan baik, manajemen kegiatan, dan partisipasi masyarakat.*

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
 <b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
 <b>BAB II     TELAAH PUSTAKA</b>	
2.1 Pengertian Pembangunan .....	12
2.2 Otonomi Desa .....	15
2.3 Pengertian Desa.....	16
2.4 Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan .....	20
2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan .....	23
2.6 Defenisi Konsep .....	26
2.7 Konsep Operasional .....	26
2.8 Teknik Pengukuran .....	28

<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1	Lokasi dan Waktu Penelitian .....	30
3.2	Populasi dan Sampel .....	30
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.4	Jenis dan sumbe Data .....	33
3.5	Teknik Analisa Data.....	34
<b>BAB IV</b>	<b>GAMBARAN UMUM DAERAH PANELITIAN</b>	
4.1	Legenda dan Sejarah Desa Kerinci Kiri.....	36
4.2	Kondisi Umum Desa .....	37
4.3	Keadaan Sosial Ekonoomi Penduduk Desa .....	37
4.4	Pemerintahan .....	41
<b>BAB V</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
5.1	Identitas Responden .....	44
a.	Tingkat Pendidikan .....	44
b.	Tingkat Pekerjaan.....	46
c.	Tingkat Usia .....	47
d.	Tingkat Jenis Kelamin.....	48
5.2	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	
	Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan .....	48
5.2.1.	Ketepatan Sasaran .....	48
5.2.2.	Menejemen Kegiatan .....	57
5.2.3.	Partisipasi Masyarakat .....	66
5.3	Rekapitulasi Variabel Penelitian .....	74

## **BAB VI    PENUTUP**

6.1 Kesimpulan.....	77
6.2 Saran.....	77

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **BIOGRAFI**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel I.1</b>	Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.....	5
<b>Tabel I.2</b>	Sumber Pendapatan Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Tahun 2011.....	6
<b>Tabel I.3</b>	Perencanaan Pembangunan Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Dari Tahun 2011.....	7
<b>Tabel I.4</b>	Data Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Dari Tahu 2011.....	8
<b>Tabel II.1</b>	Konsep Operasional Variabel Penelitian.....	27
<b>Tabel III.1</b>	Jumlah Responden Berdasarkan Unsur Aparat Pemerintah Desa.....	31
<b>Tabel IV.1</b>	Keadaan Penduduk Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Menurut Tingkat Pendidikan.....	38
<b>Tabel IV.2</b>	Keadaan Penduduk Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Menurut Jenis Mata Pencarian.....	39
<b>Tabel V.1</b>	Tingkat Pendidikan Responden.....	45
<b>Tabel V.2</b>	Jenis Pekerjaan Responden Penelitian.....	46
<b>Tabel V.3</b>	Tingkat Usia Respdn Penelitan.....	47
<b>Tabel V.4</b>	Jenis Kelamin Responden Penelitian.....	48
<b>Tabel V.5</b>	Tanggapan Responden Tentang Penentuan Lokasi.....	49
<b>Tabel V.6</b>	Tanggapan Responden Tentang Sosialisasi.....	51
<b>Tabel V.7</b>	Tanggapan Responden Tentang Pemilihan/Penetapan Kelompok Masyarakat.....	52
<b>Tabel V.8</b>	Tanggapan Responden Tentang Pengidentifikasian Masalah.....	54

<b>Tabel V.9</b>	Tanggapan Responden Tentang Perencanaan.....	55
<b>Tabel V.10</b>	Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Ketepatan Sasaran.....	56
<b>Tabel V.11</b>	Tanggapan Responden Tentang Penentuan Target Waktu.....	58
<b>Tabel V.12</b>	Tanggapan Responden Tentang Kapan Mulai dan Berakhirnya Waktu.....	59
<b>Tabel V.13</b>	Tanggapan Responden Tentang Kualitas Bangunan.....	61
<b>Tabel V.14</b>	Tanggapan Responden Tentang Kesesuaian.....	62
<b>Tabel V.15</b>	Tanggapan Responden Tentang Transparansi Biaya.....	63
<b>Tabel V.16</b>	Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Manajemen Kegiatan.....	65
<b>Tabel V.17</b>	Tanggapan Responden Tentang Keterlibatan Masyarakat.....	67
<b>Tabel V.18</b>	Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Perencanaan Kegiatan.....	68
<b>Tabel V.19</b>	Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan.....	69
<b>Tabel V.20</b>	Tanggapan Responden Tentang Pengawasan.....	71
<b>Tabel V.21</b>	Tanggapan Responden Tentang Serah Terima Hasil pembangunan.....	72
<b>Tabel V.22</b>	Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Partisipasi Masyarakat.....	73
<b>Tabel V.23</b>	Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.....	75

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Di negara berkembang umumnya, pembangunan yang lebih banyak difokuskan di perkotaan dengan penekanan pada pembangunan industri dibandingkan di pedesaan menyebabkan terjadinya 'Bias pada perkotaan', yang mencerminkan alokasi sumberdaya yang lebih berpihak pada kota sedangkan sektor pertanian diabaikan.

Paradigma kita tentang pembangunan desa berimplikasi kepada praktik dan desain kebijakan pemerintah terhadap pembangunan desa, sebagai objek ekonomi, sosial maupun politik. Pembangunan desa dapat menjadi sebuah dilema bagi pemerintah daerah, terutama daerah yang memiliki fundamental ekonomi lemah, maka dapat dipastikan bahwa desentralisasi pada daerah tersebut hanyalah sebuah nama, penerapannya akan menjadi lain dan bahkan akan terjadi ekstrasi dan eksploitasi.

Keberhasilan pemerintah daerah di masa yang akan datang, hendaknya diukur dengan indikator-indikator sosial ekonomi yang lebih masuk akal dan nyata, misalnya tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan dan status kesehatan serta ketersediaan fasilitas pelayanan umum seperti ; air bersih, listrik, sarana telekomunikasi dan transportasi. Indikator tersebut tidak hanya diukur pada wilayah perkotaan, tetapi juga sangat penting pada wilayah pedesaan. Tanpa indikator yang jelas dan terukur, birokrasi era otonomi akan tidak jelas dalam



menetapkan pola dan program pembangunannya, baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat non fisik. Dengan adanya indikator sebagaimana disebutkan di atas, maka target untuk setiap pemerintah daerah akan dapat ditetapkan. Dalam kaitan ini, kinerja eksekutif dan legislatif yang ada di daerah juga hendaknya diukur dengan menggunakan indikator yang lebih nyata, karena kewenangan yang mereka miliki sangat menentukan nasib rakyat. Ketika persoalan ekonomi masyarakat belum tertangani secara baik, maka kinerja pemerintah daerah perlu dipertanyakan, terutama bagi yang berwenang dalam pengambilan kebijakan.

Salah satu cara atau pendekatan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam membangun wilayah pedesaan adalah dengan melibatkan seluruh stakeholder untuk meningkatkan status ekonomi rakyat secara berkelanjutan, mengingat kemampuan pemerintah daerah yang sangat terbatas. Perhatian hendaknya dipusatkan pada perbaikan ekonomi rakyat, karena akan dapat mempengaruhi perbaikan kondisi kesejahteraan sosial secara umum.

Pembangunan desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional merupakan pembangunan yang paling menyentuh kehidupan masyarakat pedesaan pembangunan desa harus dimulai dengan aparat pelaksan yaitu orang yang merealisasikan rencana dan sanggup mewujudkan menjadi manfaat dan kenyamanan bagi masyarakat desa melalui proses yang tepat.

Untuk tercapainya pembangunan desa yang merupakan bagian pembangunan yang terpenting bagi pemerintah maka pelaksanaannya diserahkan kepada kepala desa sebagai koordinator dan administrator pemda. Keberhasilan pembangunan desa memungkinkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasil

menuju terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat, dengan terciptanya kenyamanan dan keadilan masyarakat maka pembangunan desa berarti sukses dalam pembangunannya.

Untuk lebih mengerti mengenai desa, disini akan di jelaskan tugas dan wewenang Kepala Desa. Adapun kewenangan Kepala Desa menurut PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 14 (1) adalah sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang di tetapkan bersama BPD;
2. Mengajukan rancangan peraturan desa;
3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desamengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
5. Membina kehidupan masyarakat desa;
6. Membina perekonomian desa;
7. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
8. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
9. Melaksanakan wewenang lainsesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari wewenang kepala desa yang telah dijelaskan diatas, salah satu diantaranya adalah mengkoordinasikan pembangunan secara parttisipatif.

Disamping itu yang dimaksud dengan lembaga kemasyarakatan desa adalah lembaga kemasyarakatan atau dengan sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan keadaan dan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat.

Adapun yang dilakukan dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Kerinci Kiri adalah melakukan musyawarah bersama masyarakat yang di prakarsai oleh kepala desa yang diikuti oleh lembaga kemasyarakatan desa Kerinci Kiri dan Badan Perwakilan Desa dalam membahas usulan yang telah ditetapkan serta menetapkan keputusan perencanaan pembangunan desa secara menyeluruh untuk diusulkan ketingkat kecamatan.

Dalam konteks ini, aparatur pemerintah di daerah dituntut untuk lebih kapabel, inovatif dan professional dalam mendesain perencanaan dan program pembangunan. Pemerintah daerah maupun DPRD sebagai pengambil kebijakan (*Policy Maker*) harus produktif memformulasikan aspirasi masyarakatnya dan mewujudkan aspirasi tersebut dalam bentuk perencanaan dan program-program pembangunan. Perencanaan maupun program-program pembangunan yang disusun dan dilaksanakan diharapkan dapat memobilisasi partisipasi masyarakat dan mengarahkan potensi sosial dalam menghasilkan produk unggulan yang dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah.

Seiring dengan perubahan kelembagaan di desa, mau tak mau mendorong sumberdaya aparatur desa untuk bekerja sesuai dengan target yang hendak dicapai. Untuk itu aparat desa harus dapat bekerja secara maksimal. SDM tidak lagi dipandang sebagai salah satu faktor produksi sebagaimana pendapat

menejemen kuno, yang memperlakukan manusia seperti mesin. Tetapi sekarang ini aparat desa betul-betul sebagai *human capital* yang sangat berperan sesuai dengan pandangan menejemen moderen.

Seperti halnya aparatur pemerintahan yang lainnya, sekarang ini aparat desa tidak hanya melayani masyarakat tetapi harus mempunyai inovasi untuk mengembangkan desa sesuai dengan tuntutan perubahan kelembagaan agar desa mampu bersaing dengan desa lainnya.

Dilihat dari sumber daya aparaturnya, Desa Kerinci Kiri memiliki sumber daya aparatur yang cukup baik. Kebutuhan akan sumberdaya aparatur yang tangguh menghadapi perubahan kelembagaan desa bukan hanya didorong oleh faktor intern tapi juga faktor ekstern. Faktor intern, karena saat ini desa harus mempunyai keterampilan dan pengetahuan tertentu seperti membuat peraturan-peraturan desa bersama BPD, mengelola keuangan desa dan lain-lain. Untuk lebih jelas mengenai sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Desa Kerinci Kiri dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.1 Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak**

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1	SD	3
2	SMP	2
3	SMA	2
4	D3	-
5	S1	1
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>

*Sumber : Kantor Kepala Desa 2012*

Dengan sumber daya aparatur tersebutlah pemerintah desa menjalankan pemerintahan sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki. Desa Kerinci Kiri

adalah desa tertua dan tradisional di wilayah Kecamatan Kerinci Kanan yang mana desa ini sejak awalnya tidak termasuk dalam kawasan transmigrasi oleh pemerintah pusat. Menurut keterangan tokoh masyarakat Desa Kerinci Kiri, Desa Kerinci Kiri sudah ada sejak zaman Kerajaan Siak masih berjaya, pemimpin Pemerintah Desa saat itu disebut Batin atau Penghulu yang kewenangannya sama dengan Kepala Desa saat ini.

Dalam hal perencanaan pembangunan di pedesaan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa bekerjasama dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Desa Kerinci Kiri sudah melaksanakan perencanaan pembangunan tersebut, baik berupa pelaksanaan pengadaan pembangunan maupun rehabilitasi pembangunan yang telah ada. Dengan sumber pendapatan yang ada, Desa Kerinci Kiri membuat perencanaan pembangunan yang sudah dimusyawarahkan bersama oleh aparat pemerintah desa dan masyarakat. Adapun sumber Pendapatan Desa Kerinci Kiri dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.2 Sumber Pendapatan Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Tahun 2011**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Aloaksi Dana Desa (ADD)	280.027.200
2.	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten	104.000.000
3.	Pendapatan Asli Desa (PADes)	28.800.000
<b>Total</b>		<b>412.827.200</b>

*Sumber : Kantor Kepala Desa 2012*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sumber dana desa diperoleh dari Bagian Dana Perimbangan Pemerintahan Kabupaten yaitu Alokasi Dana Desa

(ADD) berjumlah Rp. 280.027.00, Bantuan Keuangan dari Pemerintah berjumlah Rp.104.000.000 dan Pendapatan Asli Desa Kerinci Kiri adalah berjumlah Rp.28.800.000 yang bersumber dari usaha perkebunan kelapa sawit desa memiliki luas sekitar 1 Ha tanah.

Berdasarkan hasil Musrenbangdes Desa Kerinci Kiri membuat perencanaan untuk pembangunan desa, baik pembangunan fisik maupun pembangunan nonfisik.

Untuk mengetahui perencanaan pembangunan di Desa Kerinci Kiri maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel : 1.3 Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Dari Tahun 2011**

Tahun	Nama Usulan Proyek	Volume	Lokasi
2011	1. Pembangunan Pos Keamanan Desa	4 unit	Desa Kerinci Kiri
	2. Pembangunan Jembatan	2 unit	Dusun Kelapas
	3. Pengerasan Jalan	800 M	Dusun Kelapas
	4. Pengaspalan Jalan Poros Desa	800 M	Desa Kerinci Kiri
	5. Pembangunan Drenase	500 M	Desa Kerinci Kiri
	6. Pos Penimbangan Bayi	1 unit	Desa Kerinci Kiri
	7. Gedung SD	1 unit	Desa Kerinci Kiri
	8. Pembangunan Gapura Desa	1 unit	Desa Kerinci Kiri

*Sumber : Kantor Kepala Desa Kerinci Kiri 2011*

Pada tabel di atas dapat dilihat konsep dari perencanaan pembangunan pada tahun 2011. Memang dalam konsep perencanaan yang ada perencanaannya dilaksanakan oleh kepala desa beserta perangkat-perangkatnya, namun dalam hal ini partisipatif masyarakat juga sudah berperan tapi belum begitu maksimal, ini dilihat dari aspirasi masyarakat yang tidak tersalurkan sepenuhnya.

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Pasal 63 menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuandalam sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya. Yang dimaksud dengan partisipatif disini adalah dalam ketentuan ini adalah melibatkan pihak terkait dalam penyusunan perencanaan pambangunan desa, yang dalam hal ini tentunya peran masyarakat juga harus ikut disertakan.

Berdasarkan tabel di atas maka dapat pula dilihat pada tabel dibawah ini sejauh mana pelaksanaan pembangunan pemerintah Kabupaten Siak khususnya pembangunan fisik di Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.

Adapun data pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak dapat dilihat ditabel dibawah ini :

**Tabel 1.4 Data Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Dari Tahun 2011**

Tahun	Pelaksanaan Pembangunan	Target Pemda	Terealisasi Desa	Lokasi
2011	1. Pembangunan Pos KeamananDesa	4 unit	4 unit	Desa Kerinci Kiri
	2. Pembangunan Jembatan	2 unit	1 unit	Dusun Kelapas
	3. Pengerasan Jalan	800 M	-	Dusun Kelapas
	4. Pengaspalan Jalan Poros Desa	800 M	-	DesaKerinci Kiri
	5. Pembangunan Drenase	500 M	500 M	Desa Kerinci Kiri
	6. Pos Penimbangan Bayi	1 unit	-	Desa Kerinci Kiri
	7. Gedung SD	1 unit	-	Desa Kerinci Kiri
	8. Pembangunan Gapura Desa	1 unit	-	Desa Kerinci Kiri

*Sumber : Kantor Kepala Desa Kerinci Kiri, 2011*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan terutama bangunan fisik belum begitu maksimal dalam pelaksanaannya, dapat terlihat pada beberapa program pembangunan yang belum terealisasi, diantaranya pengerasan jalan di Dusun Kelapas, pengaspalan jalan poros desa, pos penimbangan bayi, gedung SD, pembangunan gapura, dan pada pembangunan jembatan di Dusun Kelapas yang ditargetkan 2 unit jembatan, tetapi dalam pelaksanaannya hanya terlaksana 1 unit. Beberapa pembangunan diatas merupakan pembangunan dari Program Hibah Khusus Keuangan Kepada Kelompok Masyarakat Desa/Kelurahan (*Specific Block Grant*). Sedangkan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 38 Tahun 2010 keberhasilan pelaksanaan program Hibah Khusus Keuangan Kepada Masyarakat Desa/Kelurahan (*Specific Block Grant*) dikatakan berhasil apabila adanya ketepatan sasaran dalam pembangunan, manajemen kegiatan yang baik, dan partisipasi masyarakat. Disini kita bisa melihat bahwa pembangunan yang belum bisa terlaksana dengan baik kemungkinan dikarenakan belum terpenuhinya indikator-indikator diatas. Misalnya pada partisipasi masyarakat, dimana dalam sebuah pembangunan tidak akan bisa berhasil apabila tidak adanya keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan. Ataupun tidak tersalurnya aspirasi masyarakat desa, karena banyak dari masyarakat kita yang tidak mengenai bagaimana proses perencanaan pembangunan itu disusun.

Lemahnya pengetahuan masyarakat sebagai sebuah kendala dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan. Di sisi lain, kurangnya informasi dan edukasi yang dilakukan pemerintah baik di tingkat daerah maupun pusat



menyebabkan rentang pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan perencanaan pembangunan menjadi semakin lebar. Seperti diketahui bersama bahwa perencanaan pembangunan itu sendiri merupakan domain yang memerlukan keterlibatan masyarakat karena di dalam perencanaan pembangunan masyarakat merupakan subyek dan obyek yang berperan aktif dan kurangnya koordinasi kepala desa.

Dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak ini, tidak hanya pembangunan fisik saja yang belum berjalan dengan baik, tapi juga dari pembangunan non fisik. Pembangunan non fisik disini diantaranya adalah seperti koperasi desa yang tidak berjalan pembangunannya, padahal koperasi disini sangat berperan untuk membantunya pertumbuhan ekonomi masyarakat lemah dan untuk menambah pendapatan desa, dan juga pada pendidikan TK yang belum tercatat di dinas pendidikan.

## **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan gejala-gejala yang telah dikemukakan diatas, maka selanjutnya penulis merumuskan masalah : **“Bagaimana Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.”**

## **3. Tujuan Penelitian**

Dari uraian yang telah di kemukakan dalam latar belakang dan perumusan malsalah tersebut di atas, maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Kerici Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.
2. Untuk mengetahui hambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Kerici Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.

#### **4. Manfaat Penelitian**

- a. Menjadikan bahan masukan bagi instansi terkait dalam hal pelaksanaan pembangunan di Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.
- b. Sebagai bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam konteks penelitian yang sama atau yang ingin melanjutkan penelitian ini.
- c. Sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan ilmu pemerintahan khususnya.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **1. Pengertian Pembangunan**

Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lain, negara satu dengan negara lain. Penting bagi kita untuk dapat memiliki definisi yang sama dalam mengartikan pembangunan. Secara tradisional, pembangunan memiliki arti peningkatan yang terus menerus pada *Gross domestic Product* atau Produk Domestik Bruto suatu negara. Untuk daerah, makna pembangunan yang tradisional difokuskan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto suatu provinsi, kabupaten atau kota.

Namun, muncul kemudian sebuah alternatif definisi pembangunan ekonomi yang lebih menekankan pada peningkatan *income per capita* (pendapatan per kapita). Definisi ini menekankan pada kemampuan suatu negara untuk meningkatkan output yang dapat melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Definisi ini menekankan pertumbuhan penduduk. Definisi pembangunan tradisional sering dikaitkan dengan sebuah strategi mengubah struktur suatu negara atau sering kita kenal dengan industrialisasi. Kontribusi pertanian mulai diganti dengan kontribusi industri. Definisi yang cenderung melihat segi kuantitatif dari pembangunan ini dipandang perlu menengok indikator-indikator sosial yang ada.

Paradigma pembangunan modern memandang suatu pola yang berbeda dengan pembangunan ekonomi tradisional. Pertanyaan beranjak dari benarkah

semua indikator ekonomi yang ada memberikan gambaran kemakmuran. Beberapa ekonom modern mulai mengedepankan penurunan tahta pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan distribusi pendapatan dan penurunan tingkat pengangguran yang ada. Teriakan para ekonom ini membawa perubahan dalam paradigma pembangunan yang mulai menyoroti bahwa pembangunan harus dilihat sebagai suatu proses yang multidimensional (Kuncoro, 2003).

Beberapa ahli menganjurkan bahwa pembangunan suatu daerah haruslah mencakup tiga inti nilai (Kuncoro, 2000; Todaro, 2000:16-18) :

1. Ketahanan : kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (sandang, pangan , papan, kesehatan, dan proteksi) untuk mempertahankan hidup.
2. Harga diri : pembangunan haruslah memanusiakan orang. Dalam arti luas pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu.
3. Kebebasan bagi setiap individu suatu negara untuk berfikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Dalam telaah pustaka ini terlebih dahulu diangkat definisi tentang pembangunan, menurut Siagian, (2005: 120) pembangunan adalah sebagai suatu usaha atau usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintahan menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Siagian (2000 : 4) juga mengemukakan pembangunan merupakan suatu proses. Berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang di satu pihak bersifat independen akan tetapi dipihak lain merupakan bagian dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir. Banyak cara yang dapat digunakan untuk menentukan pentahapan tersebut, seperti berdasarkan jangka waktu, biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh.

Menurut Ndraha (2003 : 132) pembangunan berasal dari kata bangun sebagai konsep pembangunan mempunyai lima arti : sadar/siuman, bangkit atau berdiri, bentuk, membuat/mendirikan, mengisi/membina.

Bryant dan White (1987 : 21) berpendapat bahwa pengertian pembangunan adalah sebagai suatu peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan yang mempunyai beberapa implikasi tertentu, yaitu kapasitas, keadilan, penumbuhan kuasa dan wewenang.

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melaui upaya-upaya secara sadardan terencana. Sedangkan pelaksanaan adalah strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Tujuan utama dari pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, untuk itu pemerintah harus mengetahui lebih jelas mengenai masyarakat, apakah yang ingin oleh masyarakat dalam hidupnya. Memang beragam usaha dari berbagai sektor sudah dilakukan oleh pemerintah dalam pencapaian tujuan pembangunan. Namun, sering kali terjadi bahwa usaha dan niat

baik tersebut tidak mencapai seluruh masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Hal ini disebabkan karena pembangunan lebih banyak difokuskan diperkotaan dibanding di pedesaan.

## **2. Otonomi Desa**

Otonomi bermacam-macam. Ada otonomi berian, ada otonomi kuhonan, dan ada otonomi bawaan. Sudah jelas, otonomi daerah ala Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah otonomi berian yaitu otonomi yang diberikan kepada suatu masyarakat (hukum), supaya masyarakat itu pada suatu saat berkemampuan menjadi daerah otonomi benaran. Otonomi kuhonan adalah otonomi yang diberikan oleh negara kepada suatu masyarakat (hukum) berdasarkan permohonan masyarakat itu, karena masyarakat itu terbukti berkemampuan sebagai daerah otonomi. Otonomi desa adalah otonomi bawaan (bersendikan adat dan agama) masyarakat sejak lahirnya, sama seperti setiap orang mempunyai *privacy* dalam dirinya, dan Negara mempunyai kadaulatan. *Privacy* itu pada masyarakat disebut otonomi.(Ndraha, 2006 : 560)

Haw. Widjaja (2003 : 165) mengemukakan Otonomi Desa merupakan Otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati Otonomi asli yang dimiliki oleh Desa tersebut.

Menurut Awang ( 2010 : 77) Otonomi desa adalah kemandirian desa. Kemandirian desa dengan arti kata masalah internal desa, rumah tangganya sendiri, yakni kemampuan mengelola maupun membiayai pemerintahan,

pembangunan, dan kemasyarakatan dengan bertumpu pada hasil sumber daya lokal, swadaya, dan gotong royong masyarakat.

Otonomi tidak bisa dilepaskan dari konteks hubungan pemerintah desa dengan pemerintah tingkat atasnya, sebab desa menjadi bagian integral dari negara yang menjalankan sejumlah kewajiban. Otonomi desa bukan hanya sekedar swadaya masyarakat, tetapi juga persoalan pemerataan dan keadilan hubungan antara pemerintah tingkat atas dengan pemerintah tingkat desa.

### **3. Pengertian Desa**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 19 dapat ditafsirkan bahwa teori *governance* tidak diterapkan pada pemerintahan tingkat negara, dan hanya diterapkan pada tingkat daerah. Pada tingkat desa/kelurahan, teori tersebut sangat relevan dan oleh sebab itu harus digunakan. Sistem ini yang disebut adat istiadat, adat nan-teradat, dan adat-nan-diadatkan yang berfungsi sebagai kekuatan masyarakat civil, serta lembaga musyawarah desa sebagai sumber norma publik.. adalah buktinya.

Tjondronegoro (dalam Ndraha, 2006:554) berpendapat bahwa desa itu buatan belanda. Yang merupakan satuan masyarakat hukum asli menurut sumber ini adalah satuan masyarakat yang di jawa disebut pedukuhan atau yang setingkat.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (HAW. Widjaja, 2003).

Menurut Yuliarti (Dalam wasistiono, 2006 : 7) desa merupakan tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.

Menurut Bintaro (Dalam wasistiono, 2006 : 8) desa adalah perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu adalah suatu ujud atau penampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis dan kultural, yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.

Menurut Ndraha (2006 : 563) mengemukakan desa memiliki kedudukan diantaranya adalah *Pertama*: desa adalah basis masyarakat civil yang merupakan sokoguru *governance*. Jika masyarakat civil lemah, kualitas *governance* menjadi buruk. *Kedua*: secara tradisional, menurut adat, desa adalah masyarakat yang memiliki otonomi yang disebut otonomi desa. Dengan otonomi itu, desa berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya. *Ketiga*: desa adalah masyarakat hukum yang berwenang melakukan perbuatan hukum dan menetapkan keputusan hukum. *Keempat*: desa adalah pabrik layanan civil dan jasa publik. Supaya produk-produk itu bisa diproses, pada setiap unit kerja disediakan *input* yang diperlukan, yang biasanya disebut 6 M (*man, money, materials, machine, method, dan market*). *Kelima*: desa adalah warung produk-produk pemerintahan. Di warung itulah terjadi transaksi antara pemerintah dengan yang diperintah. *Keenam*: desa berkedudukan sebagai unit kerja administratif pemerintah terendah, dahulu di



bawah administrasi kecamatan, sekarang masih belum jelas. *Ketujuh:* desa adalah lembaga kontrol sosial. Posisi ini adalah konsekuensi kedudukannya sebagai masyarakat civil.

Sebagai unsur pemerintah desa menjalankan berbagai peranan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Sebagai komunikator, yaitu mengidentifikasi, menampung, dan menyampaikan keluhan, protes, pesanan, aspirasi, tuntutan, dan dukungan masyarakat kepada pihak-pihak terkait dengan kebutuhan wargayang proses pemenuhannya berlangsung diluar atau di atas desa.
2. Sebagai inovator, yaitu mengamati, mencermati, menyeleksi, dan mengelolanilai-nilai baru yang datang dari luar atau yang tumbuh dari dalam.
3. Sebagai *Local Policy Maker*, yaitu menggali aspirasi masyarakat dan menjadikannya masukan buat identifikasi masalah-masalah dan sasaran-sasaran yang hendak dicapai desa.
4. Sebagai implementasian kebijakan atau pelaksanaan rencana yang sudah ditentukan.
5. Dalam pelaksanaan rencana dan implementasi kebijakan memerlukan sarana dan prasarana.
6. Memberikan pelayanan kepada masyarakat.
7. Memberdayakan masyarakat sehingga menjadi masyarakat yang berdaya atas haknya.
8. Melakukan kontrol terhadap proses pemerintahan.

9. Mengevaluasi semua proses pemerintahan.
10. Menampung aspirasi masyarakat untuk dijasikan *feedback*, sebagai bahan koreksi perubahan dan pembaharuan kedepannya.
11. Menyampaikan *feedback* untuk dijadikan masukan baru.
12. Melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh pemerintah yang lebih tinggi. (Ndraha, 2006 : 564-566)

Dalam Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 pengertian desa disebutkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Dalam UU ini ditegaskan bahwa landasan mengenai pengaturan pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat.

Dari pengertian desa di atas, dapat diambil ciri desa adalah :

1. Desa sangat dekat dengan wilayah usaha tani.
2. Dalam wilayah itu perekonomian merupakan kegiatan ekonomi dominan.
3. Faktor-faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakatnya.
4. Kontrol sosial lebih bersifat informal dan interaksi antar warga desa lebih bersifat personal dalam bentuk tatap muka, dan mempunyai tingkat homogenitas yang relatif tinggi dan ikatan sosial yang relatif lebih tinggi daripada kota.

#### **4. Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan**

Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa, perencanaan pembangunan desa pada pasal 63 ayat 3 yaitu :

1. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota.
2. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya.
3. Dalam menyusun perencanaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang diinginkan suatu organisasi, maka manajemen merupakan salah satu alat dalam pencapaian tersebut. Manajemen yang baik akan mempermudah terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, pegawai, dan masyarakat.

Didalam melakukan pembangunan, setiap Pemerintah Daerah memerlukan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya. Seiring dengan semakin pesatnya pembangunan bidang ekonomi, maka terjadi peningkatan permintaan data dan indikator-indikator yang menghendaki ketersediaan data sampai tingkat Kabupaten/ Kota. Data dan indikator-indikator pembangunan yang diperlukan adalah yang sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Pola dan mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan antara pusat dan daerah dilakukan melalui forum yang dinamakan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Musrenbang merupakan forum dalam rangka menyusun rencana pembangunan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai di tingkat pusat. Musrenbang bertujuan untuk :

- a. Mengoptimalkan dan mengefektifkan proses koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan
- b. Mengefektifkan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mensinergikan upaya-upaya perubahan sosial yang diinginkan secara berkelanjutan
- c. Mensinergikan pembangunan antarsektor dan antar daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran bersama
- d. Menjamin pelaksanaan pembangunan nasional yang lebih mantab dan berkesinambungan

Menurut Nickels, McHugh and McHugh (dalam Tisnawati Sule dan Saefullah 2005 : 8) menyebutkan bahwa fungsi manajemen terdiri dari empat fungsi adalah perencanaan (*Planing*), pengorganisasian (*Organizing*), pengarahan (*Directing*), dan pengawasan (*Controlling*).

Fungsi perencanaan yaitu perencanaan (*planing*) sering kali merupakan pokok dasar tercapainya suatu tujuan. Dan dalam membuat suatu rencana ini, haruslah diberikan kepada pihak yang lebih mengetahui konsep tujuan yang akan dicapai.

Di daerah pedesaan dan kelurahan dalam pembuatan dan pelaksanaan sebuah program kerja dalam bidang pembangunan, maka dalam hal pembuatan perencanaan pembangunan desa dan kelurahan akan diserahkan pada sebuah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa yang memiliki statement dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat.

Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa menyatakan hal-hal yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan desa adalah :

1. Tersedianya data dan informasi selengkapnya yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan tentang desa yang bersangkutan yang mencakup tentang :
  - a. Penyelenggaraan pemerintah desa
  - b. Organisasi tata laksana pemerintah desa
  - c. Keuangan desa
  - d. Profil desa
  - e. Informasi lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah pembangunan dan kemasyarakatan desa.
2. Tersedianya peta desa yang lengkap yang menggambarkan desa dari segi :
  - a. Wilayah administrasi pemerintahan desa
  - b. Peta potensial desa
  - c. Peta prasarana
  - d. Peta yang menggambarkan kondisi kependudukan
  - e. Analisa data, keadaan desa dan permasalahan desa

- f. Tokoh pemuda/masyarakat, tenaga ahli/terdidik, kader pembangunan desa, dan sebagainya.

Adapun yang dilakukan dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Kerinci Kiri adalah melakukan musyawarah bersama masyarakat yang diprakarsai oleh kepala desa yang diikuti oleh lembaga kemasyarakatan Desa Kerinci Kiri dan badan perwakilan desa dalam membahas usulan yang telah ditetapkan serta menetapkan keputusan perencanaan pembangunan desa secara menyeluruh untuk diusulkan ketingkat Kecamatan.

Jadi sudah jelas bahwa yang paling diutamakan dalam pelaksanaan pembangunan desa adalah dilakukan musyawarah dalam menentukan perencanaan untuk dijadikan haluan dalam pelaksanaan pembangunan. Karena perencanaan yang telah dibuat oleh lembaga kemasyarakatan bersama kepala desa dan diputuskan melalui badan permusyawaratan desa. Maka barulah dilakukan suatu usaha dalam menggalang kekuatan untuk perencanaan dan pelaksanaan desa sehingga dalam pembangunan dapat dijalankan dengan baik serta bisa berkembang secara teratur.

## **5. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan**

Sebagaimana layaknya suatu aktivitas yang terkait dengan masalah sosial kemasyarakatan dan selalu bersifat dinamis, keberhasilan atau kegagalan program perencanaan pembangunan daerah selalu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tersebut secara khusus dapat berbeda

tergantung pada situasi dan kondisi yang sedang berlaku di daerah perencanaan. Substansi permasalahan yang berbeda antara satu daerah dan daerah lainnya dapat menyebabkan berbedanya faktor-faktor dimaksud.

Peraturan Bupati Siak Nomor : 38 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hibah Khusus Keuangan Kepada Kelompok Masyarakat Desa/Kelurahan (*Specific Block Grant*) menyebutkan untuk mengukur keberhasilan program Hibah Khusus Keuangan Kepada Kelompok Masyarakat Desa/Kelurahan (*Specific Block Grant*) dinilai dari beberapa indikator diantaranya adalah :

1. Ketepatan Sasaran
2. Manajemen Kegiatan
3. Partisipasi Masyarakat

Dari beberapa hal yang di kemukakan diatas maka penulis mengangkat beberapa teori menurut para ahli penyebab keberhasilan atau optimalisasi suatu pembangunan agar melengkapi referensi.

**Menurut Handoko (2003 : 14) menjelaskan pengertian perencanaan adalah:**

1. Pemeilihan atau penetapan tujuan – tujuan organisasi
2. Penentuan strategi, kebijakan proyek, program, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

Sedangkan Griffin (2004 : 14) mengatakan bahwa perencanaan adalah menetapkan tujuan organisasi dan menentukan cara terbaik untuk mencapainya.

Manullang (2004 : 45) mengatakan bahwa untuk membuat rencana ada beberapa tindakan yang harus dilalui. Langkah-langkah tersebut adalah :

1. Menetapkan tugas dan tujuan
2. Mengobservasi dan menganalisis
3. Mengadakan kemungkinan-kemungkinan
4. Membuat sintesi
5. Menyusun rencana.

Dalam pembangunan sebuah desa peran kepemimpinan seorang kepala desa sangat berperan penting. Menyinggung tentang kepemimpinan, disini Ordway Tead mengemukakan tentang kepemimpinan adalah perpaduan perangai yang memungkinkan seseorang mampu mendorong pihak lain menyelesaikan tugasnya.

Menurut KencanaSyafie (2003 : 132) kepemimpinan adalah kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk orang lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok.

Menurut P. Pigors (dalam Syafiie 2003 : 133) kepemimpinan adalah suatu proses saling mendorong melalui keberhasilan interaksi dari perbedaan-perbedaan individu, mengontrol daya manusia dalam mengejar tujuan bersama.

Selain memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, seorang Kepala Desa juga harus mampu menjalankan tugasnya sebagai pemimpin berdasarkan tugas – tugas yang sudah ditetapkan.



## **6. Defenisi Konsep**

Agar tidak terjadi kekeliruan mengenai pengertian tentang konsep yang digunakan, maka berikut ini akan dijelaskan dari masing-masing konsep tersebut :

1. Perencanaan adalah menetapkan tujuan dan menentukan cara terbaik untuk mencapainya.
2. Pelaksanaan adalah suatu kegiatan atau upaya penghulu serta masyarakat dalam melaksanakan pembanguna sesuai apa yang dicita-citakan.
3. Pembangunan desa adalah usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Ketepatan sasaran adalah pelaksanaan kegiatan pembangunan yang meliputi penentuan lokasi, target sosialisasi, pemilihan/penetapan kelompok masyarakat.
5. Menejemen kegiatan adalah adanya pengaturan dalam biaya dan waktu dalam melaksanakan kegiatan.
6. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan/keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan.

## **7. Konsep Operasional**

Konsep operasional merupakan suatu cara untuk mengukur variabel-variabel dan untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau alami.

Variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan (Sugiono, 2009: 38).

Untuk lebih jelas mengenai variabel penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Variabel Penelitian	Indikator	Sub indikator
Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	a. Ketepatan Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dikatan Berhasil Apabila Tepat dalam Penentuan Lokasi</li> <li>- Target Sosialisasi</li> <li>- Pemilihan/Penetapan Kelompok Masyarakat Yang Bertanggungjawab dalam Pelaksanaan Pembangunan</li> <li>- Pengidentifikasian Masalah</li> <li>- Perencanaan</li> <li>- Penentuan Target Waktu</li> <li>- Waktu Mulai dan Berakhir Pelaksanaan Pembangunan</li> <li>- Kualitas Bangunan</li> <li>- Kesesuaian Biaya dalam Pelaksanaan Pembangunan</li> <li>- Transparansi Biaya</li> </ul>
	b. Menejemen Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterlibatan Masyarakat dalam musyawarah</li> <li>- Perencanaan kegiatan</li> <li>- Pelaksanaan,</li> <li>- Pengawasan,</li> <li>- Serah terima kepada desa/kelurahan untuk digunakan, dikelola, dan dipelihara oleh masyarakat</li> </ul>

	c. Partisipasi Masyarakat	
--	---------------------------	--

**Tabel II.1 : Konsep Operasional Variabel Penelitian Tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Kerinci Kiri**

## 8. Teknik Pengukuran

Berdasarkan Variabel diatas, pengukuran dari masing-masing indikatornya adalah sebagai berikut:

1. Ketepatan Sasaran, adalah ketetapan dalam penentuan target yang meliputi penentuan lokasi, sosialisasi, pemilihan//penetapan kelompok masyarakat, pengidentifikasian masalah, dan perencanaan. Dikategorikan :

Sangat Baik : Apabila ada ketepatan dalam penentuan lokasi, target sosialisai, pemilihan/penetapan kelompok pelaksana, pengawasan, pengidentifikasian masalah dan perencanaan.

Kurang Baik : Apabila dalam penentuan lokasi, target sosialisai, pemilihan/penetapan kelompok pelaksana, pengawasan, pengidentifikasian masalah dan perencanaan kurang baik dilaksanakan.

Tidak Baik : Apabila dalam penentuan lokasi, target sosialisai, pemilihan/penetapan kelompok pelaksana, pengawasan,

pengidentifikasian masalah dan perencanaan tidak baik dalam pelaksanaanny.

2. Menejemen Kegiatan adalah adanya pengaturan mengenai kesesuaian biaya, transparansi biaya, target waktu dan waktu mulai dan berakhir pembangunan dalam melaksanakan kegiatan.

Sangat Baik : Apabila adanya kesesuaian biaya, kualitas dan waktu dalam pelaksanaan pembangunan.

Kurang Baik : Apabila biaya, kualitas dan waktu yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan kurang baik dalam pelaksanaannya.

Tidak Baik : Apabila tidak adanya kesesuaian biaya, kualitas dan waktu dalam pelaksanaan pembangunan.

3. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan/keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan.

Sangat Baik : Apabila adanya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan yaitu terlibat dalam musyawarah, perencanaan kegiatan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian.

Kurang Baik : Apabila keterlibatan masyarakat dalam pembangunan yaitu terlibat dalam musyawarah, perencanaan kegiatan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian kurang baik dilaksanakan.

Tidak Baik : Apabila keterlibatan masyarakat dalam pembangunan yaitu terlibat dalam musyawarah, perencanaan kegiatan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian tidak baik dilaksanakan.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini guna memperoleh data yang diperlukan maka penulis menyusun metode penelitian survei deskriptif yaitu memberikan gambaran yang secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu sebagai berikut :

##### **1. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai dengan Mei 2012.

##### **2. Populasi dan Sampel**

###### **2.1 Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiono, 2009 : 90).

###### **2.2 Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Maka sampel merupakan bagian dari populasi yang mewakili secara keseluruhan untuk dijadikan responden dalam penelitian (Sugiyono, 2009 : 90).

Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi yaitu seluruh masyarakat Desa Kerinci Kiri yang berjumlah 2683 jiwa yang terdiri dari 663 KK. Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini terdiri dari dua unsur :

### 1.2.1. Aparatur Pemerintahan Desa

Dari aparatur pemerintahan desa, yang menjadi populasi adalah aparat pemerintahan desa yang berjumlah 6 orang yang terdiri dari 1 orang kepala desa, 1 orang ketua BPD dan 4 orang dari aparatur pemerintah lainnya yang dipersentasekan 100%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel III.1. Jumlah Responden Berdasarkan Unsur Aparat Pemerintah Desa, Dalam Merumuskan Dan Mengembangkan Pembangunan Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak 2011**

No	Jenis Populasi	Jumlah		Persentase (%)
		Populasi	Sampel	
1	Kepala Desa	1	1	100
2	Ketua BPD	1	1	100
3	Sekretari desa	1	1	100
4	Kepala urusan pembangunan	1	1	100
5	Kepala urusan pemerintahan	1	1	100
6	Kepala urusan kesejahteraan Rakyat/umum	1	1	100
Jumlah		6	6	100

**Sumber : Kantor Kepala Desa Kerinci Kiri 2012**

Tabel di atas menunjukkan jumlah sampel dari unsur aparatur pemerintah yang peneliti wawancarai dalam penelitian berjumlah 6 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Desa, 1 orang ketua BPD, 1 orang Sekretaris Desa dan 3 orang

kepala urusan masing-masing kepala urusan pembangunan, kesejahteraan rakyat dan pemerintahan.

### 1.2.2. Masyarakat

Dari unit masyarakat desa yang menjadi populasi adalah seluruh jumlah masyarakat desa yang berjumlah 663 KK. Untuk mempermudah dalam pengumpulan data ini, maka jumlah populasi yang dijadikan responden dari unsur masyarakat yang dipersentasekan 10% dengan menggunakan rumus slovin (Umar, 2004 :72) berjumlah 87 KK. Untuk lebih jelas dapat dilihat dibawah ini:

$$n = \frac{n}{1+N(e)^2}$$

$$n = \frac{663}{1 + 663(10\%)^2}$$

$$n = \frac{663}{1 + 663 .0,01}$$

$$n = \frac{663}{1 + 6,63}$$

$$n = \frac{663}{7,63}$$

$$n = 87$$

Keterangan: n = ukuran sampel

N = total populasi

e = tingkat error (toleransi kesalahan) dari sampel sebesar 10%.

## 3. Teknik Pengumpulan Data



Dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan beberapa pengumpulan data yaitu :

a. Observasi

Yaitu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti secara langsung di lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang berhubungan dengan penelitian. Misalnya mengamati keadaan pembangunan di tempat tersebut.

b. Kuesioner

Yaitu pertanyaan-pertanyaan yang dipersiapkan penulis terlebih dahulu beserta alternatif jawaban, kemudian dibagikan kepada responden. Responden akan menjawab sesuai dengan alternatif jawaban yang disediakan.

c. Wawancara

Yaitu berupa tanya jawab langsung dengan responden untuk memperoleh data atau informasi yang relevan dengan penelitian ini dimana dilakukan dengan tatap muka.

#### **4. Jenis dan Sumber Data**

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan penyebaran kuisisioner dengan responden (masyarakat) tentang pendapatnya atau

tanggapan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan desa, misalnya tentang peran kepala desa dan lembaga kemasyarakatan desa, data tentang perencanaan pembangunan, data tentang pelaksanaan pembangunan, dan tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari aparat desa yang berkaitan dengan penelitian ini, data tersebut antara lain : jumlah penduduk, keadaan geografis, tingkat pendidikan, mata pencaharian, luas wilayah, dll.

## 5. Teknik Analisa Data

Apabila semua data sudah terkumpul, maka data yang sudah diperoleh dikelompokkan dan diolah menurut jenisnya. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran yang terperinci berdasarkan kenyataan di lapangan dan disusun menurut sub pembahasan, dan ditabulasikan dalam bentuk tabel, sehingga diperoleh gambaran dan dapat diambil kesimpulan.

Data yang diperoleh dari angket akan diamati dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Anas Sudijono, 2007:43) :

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Total Jumlah

Adapun pengukuran terhadap variabel penelitian dan indikator penelitian ini menggunakan tiga alternative jawaban yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Husaini Usman 2009:146) :

- |             |   |
|-------------|---|
| Sangat Baik | : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari jawaban responden berada pada interval 61%-100% |
| Kurang Baik | : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari jawaban responden berada pada interval 31%-60%  |
| Tidak Baik  | : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari jawaban responden berada pada interval 0%-30%   |

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN**

#### **A. Legenda dan Sejarah Desa Kerinci Kiri**

Desa Kerinci Kiri adalah desa tertua dan tradisional di wilayah kecamatan kerinci kanan yang mana desa ini sejak awalnya tidak termasuk dalam kawasan transmigrasi oleh pemerintah pusat. Menurut keterangan tokoh masyarakat Desa Kerinci Kiri Desa Kerinci Kiri sudah ada di zaman Kerajaan Siak masih berjaya. Pemerintah Desa saat itu disebut Batin atau penghulu yang kewenangannya sama dengan kepala desa saat ini. Desa kerinci kiri mengalami perpindahan wilayah beberapa kali seperti dari poteh ke boncah kimpal yang sekarang masuk kewilayah Kiap Jaya / Pelalawan dan pada Tahun 1974 pindah diwilayah Kelapas dan terbentuklah Desa Kerinci Kiri yang dipimpin oleh Kepala Desa, yang mana penduduknya terdiri dari bermacam suku yang sebagian besar penduduknya suku melayu, sebagai penunjang perekonomian, masyarakat Desa Kerinci Kiri dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari sebagian besar bergerak dalam bidang pertanian.

Masyarakat Desa Kerinci Kiri saat ini dapat dikatakan masih dalam ketertinggalan dalam bidang pembangunan, dikarenakan masih minimnya sumber daya manusia yang dimiliki. Berkenaan dengan hal tersebut maka perlu diadakan penyusunan RPJM ini sebagai langkah untuk mendorong pembangunan di Desa Kerinci Kiri.

## **B. Kondisi Umum Desa Kerinci Kiri**

### **1. Keadaan Geografis Desa**

#### **a. Batas Wilayah**

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kerinci Kanan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bukit Agun
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kab.Pelalawan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kab.Pelalawan

#### **b. Luas Wilayah**

Desa Kerinci Kiri merupakan salah satu desa yang termasuk dalam Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak yang mempunyai luas wilayah 5.754 Ha yang terdiri dari Tanah pekarangan 175 Ha, Perkebunan 5.575Ha, Tanah Kas desa 3 Ha, dan lain-lain 1 Ha. Secara umum keadaan topografi desa Kerinci Kiri adalah merupakan Pebukitan.

#### **c. Iklim**

Desa Kerinci Kiri mempunyai iklim tropis (dua musim).

## **C. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk**

### **1. Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk di Desa Kerinci Kiri sampai saat ini berjumlah 2683 jiwa dengan perincian laki-laki 1395 jiwa orang dan perempuan 1288 jiwa orang serta jumlah kepala keluarga (KK) berjumlah 663.

### **2. Tingkat Pendidikan**

Pendidikan sangat diutamakan oleh pemerintah baik negeri maupun swasta, baik formal maupun non formal dikarenakan melalui jalur pendidikan masyarakat akan bisa menjadi maju dan berkembang serta untuk mencerdaskan kehidupan

bangsa, oleh karena itu pembangunan di bidang pendidikan sangat mutlak diperlukan.

Bangsa yang ingin maju adalah bangsa yang mengedepankan pendidikan rakyatnya. Tingkat pendidikan yang masih relatif rendah menjadi tantangan yang besar bagi Desa Kerinci Kiri dalam membangun desa. Masalah pendidikan di Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak dinilai masih kurang hal ini terbukti banyaknya jumlah penduduk yang tingkat pendidikannya bertamatan Sekolah Dasar (SD), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel IV.1 Keadaan Penduduk Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Tidak bersekolah	677	25,2
2	SD/Madrasah	798	29,7
3	SMP/Sederajat	676	25,2
4	SMA/SMK/Sederajat	468	17,5
5	Perguruan Tinggi	64	2,4
<b>Jumlah</b>		<b>2.683</b>	<b>100</b>

**Sumber : Kantor Kepala Desa Kerinci Kiri 2012**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk desa kerinci kiri paling banyak tingkat pendidikannya adalah SD yaitu sebanyak 798 orang (29,7%), tidak sekolah sebanyak 677 orang (25,2%), SMP sebanyak 676 orang (25,2%), SMA sebanyak 468 orang (17,5), dan perguruan tinggi sebanyak 64 orang (2,4).

Jadi dapat dilihat dari tabel di atas bahwa tingkat pendidikan di Desa Kerinci Kiri dinilai masih kurang baik.

### 3. Mata Pencarian

Berusaha mencari rezeki memenuhi kebutuhan hidupnya adalah merupakan suatu yang sangat penting dalam hidup dan kehidupan manusia, sebab tanpa bekerja manusia tidak akan dapat melangsungkan kehidupannya. Oleh sebab itu, berusaha dan bekerja bisa dikatakan sebagai suatu amal yang mulia.

Mata pencarian masyarakat Desa Kerinci Kiri cukup beragam, namun di dominasi oleh para petani, sebagaimana tertuang dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel IV.2 Keadaan Penduduk Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Menurut Jenis Mata Pencarian**

No	Jenis Mata Pencarian	Jumlah	Persentase (%)
1.	PNS	37	1
2.	Petani	754	28
3.	Swasta	399	15
4.	Pedagang	70	3
5.	Buruh	732	27
6.	Tidak Bekerja	691	26
<b>Jumlah</b>		<b>2683</b>	<b>100</b>

*Sumber Data : Kantor Kepala Desa Kerinci Kiri 2012*

Berdasarkan tabel IV.2 di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, menurut mata pencarian yang banyak yaitu petani sebanyak 754 orang (28%), PNS sebanyak 37 orang (1%), swasta sebanyak 399 (15%), pedagang sebanyak 70 (3%), buruh 732 orang (27%), tidak bekerja 691 orang (26%).

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa mata pencarian masyarakat Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak dominan bertani, ini bisa dilihat dari jumlah masyarakat yang berjumlah 754 dengan persentase (28%).

#### 4. Pola Penggunaan Tanah

Pola penggunaan tanah Desa Kerinci Kiri pada umumnya diperuntukkan sebagai lahan pertanian, peternakan, perkebunan, sekolah, tempat ibadah, kuburan dan sarana kesehatan.

#### 5. Pemilikan Ternak

Dari 663 KK yang ada, 10 % KK selain menggantungkan hidup dari pekerjaan tetapnya juga sebagian lahan permukiman digunakan untuk pemeliharaan ternak antara lain sapi, Kambing, itik, ayam kampung maupun ayam potong.

#### 6. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang tersedia di Desa Kerinci Kiri sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut :

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah (unit)
1.	Kantor Desa	1
2.	Jembatan	5
3.	Air bersih	40
4	MCK	35
5.	Gorong-gorong	23
6.	Gedung Sekolah	12
7.	Pustu/puskesmas	2
8.	Posyandu	3
9.	Mushalla	6
10	Masjid	1
11	KUD	1
12	TK	1
<b>Jumlah</b>		<b>130</b>



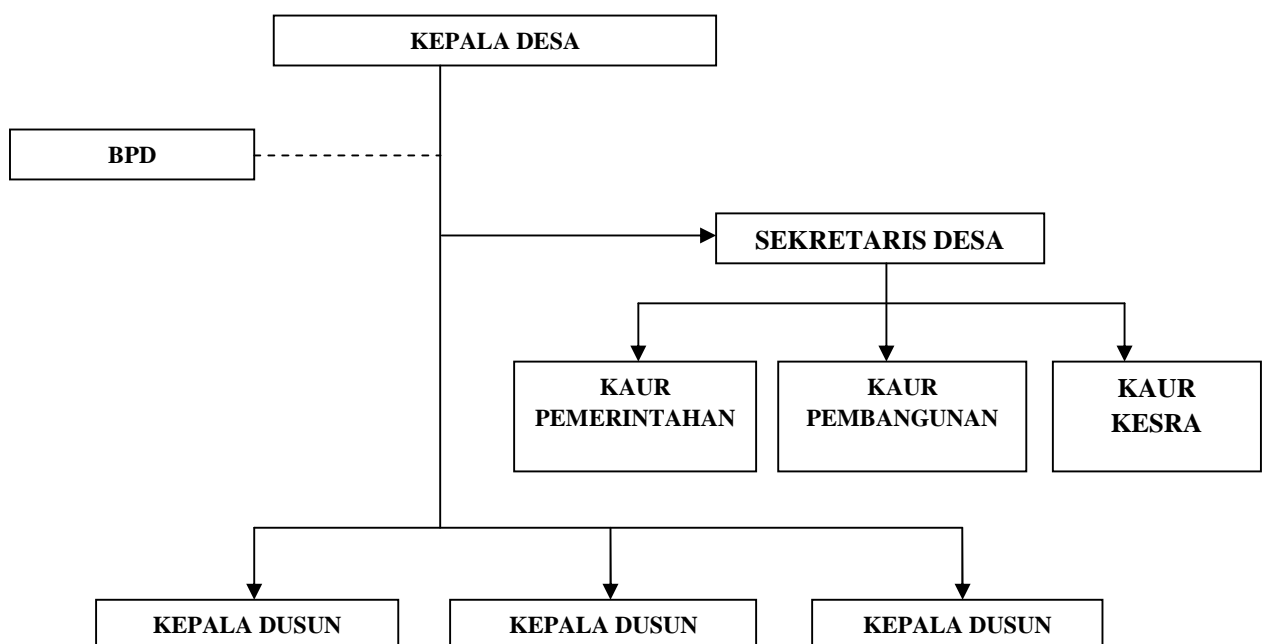
Dari tabel di atas, penulis menyimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki Desa Kerinci Kiri sudah begitu baik, hal ini bisa dilihat dari sarana air bersih yang dimiliki yaitu sebanyak 40 unit.

#### **D. Pemerintahan**

##### **1. Struktur Organisasi**

Secara keseluruhan aparat Desa dan Badan Perwakilan Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Berjumlah 9 orang untuk lebih jelas dapat dilihat di bawah ini :

**GAMBAR IV.1 SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA**



**Keterangan :**

----- : Garis Koordinasi

————— : Garis Komando

**Sumber : Kantor Kepala Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak**

## **2. Kedudukan Tugas Pokok Fungsi**

### **a. Tugas Kepala Desa**

1. Berkedudukan sebagai alat pemerintah di wilayah dan pelaksanaannya
2. Tugas pokok kepala desa menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai seni utama pelaksanaan pemerintahan di wilayahnya.
3. Fungsi desa melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan di wilayahnya, menggerakkan partisipasi masyarakat, melaksanakan tugas pemerintahan di daerah, menyelenggarakan dan ketertiban masyarakat, melaksanakan koordinasi, dan menyelenggarakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan lainnya.

### **b. Sekretaris Desa**

1. Berkedudukan sebagai unsur pembantu pimpinan di bidang ke tata usaha.
2. Tugas pokok sekretaris menyelenggarakan pelaksanaan administrasi kemasyarakatan serta memberi pelayanan di bidang ketatausahaan.
3. Fungsi pokok sekretaris untuk melaksanakan surat menyurat, kearsipan, dan administrasi umum, serta melaksanakan tugas ke Desa dalam hal Kepala Desa berhalangan melaksanakan tugasnya serta laporan keuangan.

### **c. Kepala Urusan Pemerintahan**

1. Berkedudukan sebagai urusan pembantu sekretaris, untuk memberi pelayanan ke tatausahaan sesuai dengan tugasnya masing-masing
2. Melaksanakan pencatatan, pengumpulan dan pengolahan data atau informasi yang menyangkut bidang tugas masing-masing.

**d. Kepala Urusan Pembangunan**

Kepala urusan pembangunan adalah mengurus pembangunan yang meliputi pertanggungjawaban administrasi dan membuat rancangan pembangunan desa.

**e. Kepala Urusan Umum**

Tugas pokok kepala urusan umum adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan ketatausahaan, pengumpulan dalam bidang tugasnya masing-masing.

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam pelaksanaan penelitian yang mengangkat judul Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, peneliti mengambil data yang dibutuhkan dalam hal mengambil kesimpulan. Adapun data dan hasil responden yang dilakukan dalam penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut :

#### **5.1 Identitas Responden**

Dari hasil pengamatan peneliti dalam pelaksanaan penelitian, maka terhadap keseluruhan responden yang digunakan sebagai sampel. Pada Bab ini akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan identitas responden dan hasil yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner yang sudah disebarkan kepada responden.

##### **a. Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Dalam pelaksanaan penyebaran kuesioner yang sudah disajikan kepada responden, maka langkah awal yang harus dipenuhi adalah berupa identitas responden. Responden yang dijadikan pada penelitian ini memiliki tingkat pendidikan yang berbeda, hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang digolongkan dalam tingkat pendidikan yang akan dipaparkan pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.1 Tingkat Pendidikan Responden Dalam Menilai Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak**

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tamat SD	35	40
2	Tamat SMP	25	29
3	Tamat SMA	21	24
4	Tamat PT	5	7
<b>Jumlah</b>		<b>87</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2012*

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan responden yang akan menilai keberhasilan pembangunan fisik di Desa Kerinci Kiri didominasi oleh tingkat pendidikan Sekolah Dasar. Tingkat pendidikan ini dimiliki oleh masyarakat atau pemuka adat yang selama ini berdiam di Desa Kerinci Kiri. Dengan kata lain bahwa masyarakat yang dijadikan responden berjumlah 35 orang dengan persentase 40%, Sedangkan untuk tingkat pendidikan SMP berjumlah 25 orang dengan persentase 29%, Untuk tingkat SMA berjumlah 21 orang dengan persentase 24%, dan untuk tingkat Perguruan Tinggi berjumlah 6 orang dengan persentase 7%. Sedangkan responden yang menilai dalam bentuk fisik dilapangan terhadap keberhasilan pembangunan tersebut dinilai oleh tingkat Sekolah Dasar dan SMA.

Dari keterangan tabel diatas, berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan tertinggi dari responden penelitian adalah tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD). Hal ini disebabkan di Desa Kerinci Kiri masyarakat dominan adalah tamatan SD, dan dari tingkat pendidikan ini juga bisa dinilai pendidikan di Desa ini masih sangat minim.

## **b. Responden Berdasarkan Tingkat Pekerjaan**

Setelah menyajikan identitas tentang tingkat pendidikan responden, maka identitas yang perlu disajikan pada penelitian ini adalah jenis pekerjaan responden penelitian. Adapun yang menjadi latar belakang diadakannya jenis pekerjaan dalam item pertanyaan dalam identitas responden adalah karena pekerjaan masyarakat sehari-hari dapat juga menjadi faktor pendukung peran masyarakat dalam pelaksanaan otonomi Desa.

Dibawah ini akan dipaparkan jenis pekerjaan responden yang dijadikan sebagai responden penelitian yang akan mengukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan fisik di Desa kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.2 Jenis Pekerjaan Responden Penelitian Dalam Analisis Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak**

<b>No</b>	<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	Pegawai Negri/Karyawan	9	10
2	Petani	34	39
3	Wiraswasta	24	28
4	Pedagang	20	23
<b>Jumlah</b>		<b>87</b>	<b>100</b>

**Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2012**

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pekerjaan responden didominasi pada tingkat petani. Hal ini dilihat dari tingkat pekerjaan responden yang tinggal di Desa Kerinci Kiri sebanyak 34 orang atau 39%, sedangkan untuk wiraswasta berjumlah 24 orang atau 28%, jenis pekerjaan pegawai Negeri/Karyawan berjumlah 9 orang dengan persentase 10%, dan pedagang 20 orang dengan persentase 23%.

Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa responden terbanyak terdapat pada responden dengan tingkat pekerjaan petani, ini disebabkan karena sebagian besar penduduk Desa Kerinci Kiri banyak yang bertani, karena di Desa Kerinci Kiri mata pencahariannya juga paling banyak bersumber pada hasil tani, seperti bertani sawit dan karet, dll.

### c. Tingkat Usia Responden

Usia merupakan salah satu pengelompokan identitas responden. Hal ini dinilai untuk melihat keadaan produktifitas kerja dan daya analisa responden yang akan memberikan masukan dan saran dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan dan melaksanakan pembangunan fisik di Desa Kerinci Kiri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.3 Tingkat Usia Respdnen Penelitian Dalam Menilai Perencanaan Dan Pelaksanaan Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak**

No	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	30 – 40	24	28
2	41 – 50	43	49
3	51 – 60	20	23
<b>Jumlah</b>		<b>87</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2012*

Dilihat dari pengelompokan identitas responden dalam hal usia, maka dapat dikemukakan bahwa yang mendominasi tingkat umur bagi responden berada pada tingkat usia 41 – 50 tahun yang berjumlah 43 orang dengan persentase 49%, hal ini membuktikan bahwa usia dari responden dapat dikategorikan produktifitas kerjanya masih dapat optimal.

#### **d. Responden Dari Tingkat Jenis Kelamin**

Selanjutnya dari identitas responden yang dijadikan dalam mengumpulkan data dan informasi yang memiliki jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Hal ini hanya dijadikan sebagai data dan responden semata yang tidak akan berpengaruh kepada hasil penelitian. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat jenis kelamin responden pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.4 Jenis Kelamin Responden Penelitian Dalam Menilai Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak**

<b>No</b>	<b>Jenis kelamin</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	Laki-laki	61	70
2	Perempuan	26	30
<b>Jumlah</b>		<b>87</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2012*

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa responden yang diambil dalam penelitian ini didominasi oleh responden yang berjenis kelamin laki-laki yang berjumlah 61 orang dengan persentase 70%, sedangkan responden dari jenis kelamin perempuan berjumlah 26 orang atau 30%.

## **5.2 Analisis Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak**

### **5.2.1 Ketepatan Sasaran**

Ketepatan sasaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang meliputi penentuan lokasi, target sosialisasi, pemilihan penetapan kelompok masyarakat, pengidentifikasian masalah dan perencanaan kegiatan. Untuk mengetahui mengenai hasil penelitian



dilapangan mengenai sub indikator diatas, maka akan uraikan pada tabel dibawah ini :

### 1. Penentuan Lokasi

Penentuan lokasi adalah perencanaan tempat untuk mendirikan sebuah bangunan. Penentuan lokasi ini sangat penting, guna melihat apakah lokasi yang akan didirikan bangunan ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebuah tempat apabila sesuai dengan keadaan masyarakat maka bisa dikatakan dalam penentuan lokasinya baik, tetapi apabila dalam penentuan lokasi kurang sesuai atau bahkan tidak sesuai, maka dalam penentuan lokasinya belum baik.

Untuk mengetahui apakah penentuan lokasi pada pembangunan di Desa Kerinci Kiri dapat dilihat pada jawaban responden pada tabel di bawah ini:

**Tabel V.5 Tanggapan Responden Tentang Penentuan Lokasi Dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak**

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	9	10
2	Kurang Baik	27	31
3	Tidak Baik	51	59
Jumlah		87	100

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2012*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat jawaban responden tentang penentuan lokasi dinilai berjalan kurang baik, hal ini dilihat dari jawaban responden yang mengemukakan “Sangat Baik” 9 orang dengan persentase 10%, bahwa dalam penentuan lokasi para pembuat keputusan sudah menentukan lokasi. Sedangkan untuk kategori “Kurang Baik” berjumlah 27 orang dengan persentase 31% yaitu dalam penentuan lokasi pembangunan dinilai kurang baik dalam

penentuannya, karena tanah di Desa ini pada umumnya milik warga, jadi tidak semua warga yang mau menghibahkan tanahnya untuk kepentingan umum dan untuk kategori “Tidak Baik” berjumlah 51 orang responden dengan persentase 59% yang mengatakan penentuan lokasi tidak baik, karena masyarakat tidak mau menghibahkan tanahnya untuk pembangunan. Jadi dapat dilihat, untuk penentuan lokasi pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dari jawaban responden dinilai kurang baik dilaksanakan.

Hal ini juga dilihat dari hasil wawancara penulis 18 Mei 2012 dengan Kepala Desa, yang mengemukakan bahwa : “Penentuan lokasi pada pembangunan di Desa Kerinci Kiri ini dinilai kurang baik, hal ini bisa dilihat pada pembangunan –pembangunan yang sebelumnya yang penentuan lokasinya dinilai masih kurang. Hal ini disebabkan tanah yang ada disini dominannya sudah menjadi milik masyarakat, dan terkadang tidak semua pembangunan didukung oleh masyarakat, misal dalam penghibahan tanah untuk bangunan, jadi mau tidak mau harus memilih lokasi yang kurang sesuai, mengingat juga pembangunan merupakan kebutuhan yang sangat mendesak bagi masyarakat.

Sehingga dapat dilihat bahwa penentuan lokasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dinilai masih kurang baik dalam pelaksanaannya.

## **2. Target Sosialisasi**

Sebelum melakukan pembangunan, pihak-pihak yang terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sudah pastinya membuat sebuah perencanaan, yang mana dalam perencanaannya salah satu hal yang dilakukan adalah sosialisasi. Untuk mengetahui jawaban responden tentang sosialisasi dalam

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel V.6 Tanggapan Responden Tentang Sosialisasi Dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak**

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	16	18
2	Kurang Baik	45	52
3	Tidak Baik	26	30
<b>Jumlah</b>		<b>87</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2012*

Tanggapan responden tentang sosialisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak dalam kategori “Sangat Baik” sebanyak 16 orang responden dengan persentase 18% bahwa sosialisasi dalam pembangunan sudah dilakukan, yang termasuk dalam kategori “Kurang Baik” sebanyak 45 responden dengan persentase 52% yaitu sebelum melakukan pembangunan dilakukan sosialisai terlebih dahulu, tetapi dalam hal pelaksanaanya ini masih kurang baik karena masyarakat sibuk dengan kegiatannya masing-masing dan kurang peduli masalah pembangunan, yang dipikirkannya hanyalah bagaimana dia memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sedangkan sisanya sebanyak 26 responden dengan persentase 30% menyatakan “Tidak Baik” dalam sosialisasi pada pelaksanaan pembangunan Desa Kerinci Kiri, ini disebabkan oleh faktor pendidikan dan faktor mata pencaharian.

Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa, dalam sosialisasi pelaksanaan pembangunan Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak

berdasarkan jawaban responden penulis menyimpulkan jawaban terbanyak adalah “Kurang Baik” berjumlah 45 responden dengan persentase 52%.

Hal ini juga berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kaur Pembangunan Desa Kerinci Kiri yaitu Bapak Amin : “Di Desa Kerinci Kiri ini, dalam perencanaannya sosialisasi sudah dilakukan tetapi dalam pelaksanaannya sosialisasi dinilai masih kurang baik, karena masyarakat disini seperti yang kita ketahui sibuk dengan kegiatan masing-masing, jadi waktu untuk bersosialisasi itu tidak ada. Sibuk dengan pekerjaan, bertani misalnya.” (Wawancara: 18 Mei 2012)

### **3. Pemilihan/Penetapan Kelompok Masyarakat**

Pemilihan/penetapan kelompok masyarakat adalah pemilihan masyarakat yang dibentuk dalam suatu bentuk kelompok kerja dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk mendukung kelancaran pada pembangunan, sangat perlu pemilihan/penetapan kelompok masyarakat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan, agar hasil pembangunan menjadi baik. Dibawah ini akan dijelaskan tanggapan masyarakat mengenai pemilihan/penetapan kelompok masyarakat yang mempunyai tanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel V.7 Tanggapan Responden Tentang Pemilihan/Penetapan Kelompok Masyarakat Dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak**

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	14	16
2	Kurang Baik	38	44
3	Tidak Baik	35	40
Jumlah		87	100

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2012*

Berdasarkan tabel V.7 tersebut diatas, menggambarkan bahwa dari 87 responden, sebanyak 14 responden dengan persentase 16% menyatakan “Sangat Baik” dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak melakukan pemilihan/penetapan kelompok.

Sedangkan yang masuk kategori “Kurang Baik” adalah sebanyak 38 responden dengan persentase 44% dalam artian bahwa pemilihan/penetapan kelompok masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dinilai kurang baik, karena dalam pemilihan/kelompok masyarakat ini terkadang dipilih berdasarkan rekan atau kerabat dekat dan sisanya dikategorikan “Tidak Baik” sebanyak 35 responden dengan persentase 40%, karena akibat pemilihan yang kurang baik, sehingga hasil pekerjaannya pun tidak baik karena pemilihan tidak berdasarkan kepada keahlian dan tanggungjawab seseorang tetapi berdasar kepada nilai kekeluargaan. Jadi dapat dilihat bahwa pemilihan/penetapan kelompok masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa Kerinci Kiri dinilai “Kurang Baik” dilaksanakan.

#### **4. Pengidentifikasian Masalah**

Pengidentifikasian masalah adalah usaha dalam mempelajari masalah-masalah apa saja yang akan terjadi, sehingga apabila terjadi masalah nantinya bisa taratasi karena sebelumnya sudah mengidentifikasi masalah. Untuk mengetahui pengidentifikasian masalah tentang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa Kerinci Kiri dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel V.8 Tanggapan Responden Tentang Pengidentifikasian Masalah Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak**

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	12	14
2	Kurang Baik	46	53
3	Tidak Baik	29	33
<b>Jumlah</b>		<b>87</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2012*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat dari 87 responden, sebanyak 12 responden dengan persentase 14% yang mengatakan “Sangat Baik”, berarti dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan para pembuat keputusan sudah mempelajari masalah-masalah yang akan terjadi. Sedangkan kategori “Kurang Baik” adalah sebanyak 46 responden dengan persentase 53%, yaitu dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dinilai kurang baik karena terlalu fokus dalam pelaksanaannya, sehingga kurang memikirkan hal-hal yang akan terjadi. Sedangkan kategori “Tidak Baik” berjumlah 29 responden dengan persentase sebanyak 33%, berarti dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tidak mengenali masalah-masalah yang akan terjadi, karena dalam perencanaannya tidak memikirkan masalah-masalah yang akan terjadi. Jadi dalam pengidentifikasian masalah ini dinilai “Kurang Baik” dengan jumlah 46 responden dengan persentase 53%.

## **5. Perencanaan**

Perencanaan adalah Penentuan strategi, kebijakan proyek, program, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Untuk membuat rencana ada beberapa tindakan yang harus dilalui. Langkah-

langkah tersebut adalah : menetapkan tugas dan tujuan, mengobservasi dan menganalisis, mengadakan kemungkinan-kemungkinan, membuat sintesi, serta menyusun rencana. Sehingga dengan membuat rencana dan menengikuti langkah-langkah perencanaan tersebut sebuah perencanaan bisa dikatakan baik.

Untuk mengetahui perencanaan di Desa Kerinci Kiri dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel V.9 Tanggapan Responden Tentang Perencanaan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak**

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	18	21
2	Kurang Baik	39	45
3	Tidak Baik	30	34
<b>Jumlah</b>		<b>87</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2012*

Berdasarkan tabel V.9 di atas, dari 87 responden, sebanyak 18 responden mengatakan “Sangat Baik” dengan persentase 21%, dengan arti kata perencanaan dalam pembangunan sudah dilaksanakan dengan baik. Sedangkan dengan jumlah 39 responden dengan persentase 45% dikategorikan dalam “Kurang Baik”, artinya perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan belum sempurna dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, karena sebagian dari masyarakat masih kurang dalam partisipasinya dan sisanya “Tidak Baik” berjumlah 30 responden dengan persentase 34% dalam artian dalam perencanaannya tidak seluruh masyarakat yang terlibat dikarenakan kurangnya informasi yang disampaikan.

Hal ini juga didasarkan dari hasil wawancara penulis dengan ketua BPD Bapak Amiruddin : ”Dalam suatu pembangunan, sebuah perencanaan itu sangat

penting, guna mengetahui apa-apa saja yang harus kita lakukan dalam pembangunan nantinya. Di Desa Kerinci Kiri ini, dalam perencanaan dinilai masih kurang baik, dikarenakan masih ada juga sebagian dari masyarakat kita yang kurangnya kesadaran dalam pembangunan. Serta informasinya terkadang juga tidak sepenuhnya sampai kepada seluruh masyarakat. ” (Hasil Wawancara 19 Mei 2012).

Untuk mengetahui seluruh hasil dari ketepatan sasaran dalam perencanaan dan pembangunan ini, dapat dilihat pada hasil rekapitulasi di bawah ini:

**Tabel V.10 Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Ketepatan Sasaran dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak**

No	Daftar Pertanyaan	Kriteria Jawaban			Jumlah
		Sangat Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	
1	Tanggapan Responden Tentang Penentuan Lokasi	9	27	51	87
2	Tanggapan Responden Tentang Target Sosialisasi	16	45	26	87
3	Tanggapan Responden Tentang Pemilihan dan Penetapan Kelompok Masyarakat	14	38	35	87
4	Tanggapan Responden Tentang Pengidentifikasian Masalah	12	46	29	87
5	Tanggapan Responden Tentang Perencanaan	18	39	30	87
<b>Jumlah</b>		<b>69</b>	<b>195</b>	<b>171</b>	<b>435</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>14</b>	<b>39</b>	<b>34</b>	<b>87</b>
<b>Persentase</b>		<b>16</b>	<b>45</b>	<b>39</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2012*

Berdasarkan tanggapan responden tentang proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan



Kabupaten Siak dalam penentuan lokasi, target sosialisasi, pemilihan/penetapan kelompok masyarakat, dan pengidentifikasian masalah, serta perencanaan kegiatan termasuk dalam kategori “Sangat Baik” sebanyak 14 responden dengan persentase 16%, yang termasuk kategori “Kurang Baik” sebanyak 39 responden dengan persentase 45%, dan yang menyatakan “Tidak Baik” tentang ketepatan sasaran adalah sebanyak 34 responden dengan persentase 39%.

Berdasarkan pengamatan penulis di Desa Kerinci Kiri dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya mengenai ketepatan sasaraanya dinilai pelaksanaannya “Kurang Baik”. Hal ini dilihat dari fakta dilapangan tentang penentuan lokasi, yaitu pada pembangunan mesjid dinilai kurang sesuai dalam penetuannya karena lokasi yang kurang tepat yang menyebabkan masyarakat harus menempuh jarak yang agak jauh.

Dalam hal ini yang menjadi faktor penghambatnya adalah tanah yang sudah jadi milik masyarakat ini tidak semua masyarakat yang mau menhibahkan tanahnya untuk pembangunan, sehingga mau tidak mau lokasi yang dinilai cukup sesuaiilah yang dijadikan tempat pembangunan.

### **5.2.2 Menejemen Kegiatan**

Manajemen kegiatan merupakan mengatur kegiatan pelaksanaan pembangunan yang meliputi penentuan target waktu, waktu kapan mulai dan waktu berakhirnya pembangunan, kesesuaian biaya, dan transparansi biaya, serta kualitas bangunan. Untuk mengetahui mengenai beberapa sub indikator di atas, akan diuraikan sebagai berikut :

## 1. Penentuan Target Waktu

Penentuan target waktu adalah menentukan jumlah waktu dalam proses pelaksanaan pembangunan. Dalam pembangunan ini, apakah target yang sudah ditentukan itu sesuai atau tidak dengan yang pelaksanaannya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut bisa dilihat dari jawaban responden hasil penelitian pada tabel di bawah ini :

**Tabel V.11 Tanggapan Responden Tentang Penentuan Target Waktu dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak**

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	12	14
2	Kurang Baik	30	34
3	Tidak Baik	45	52
Jumlah		87	100

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2012*

Berdasarkan tabel tersebut di atas, menggambarkan bahwa dari 87 responden, sebanyak 12 responden dengan persentase 14% menyatakan “Sangat Baik” yaitu dalam menentukan target waktu dalam pelaksanaan pembangunan sudah tentukan.

Sedangkan yang masuk kategori “Kurang Baik” adalah sebanyak 30 responden dengan persentase 34%, yaitu dalam pelaksanaan pembangunan target waktunya kurang sesuai dengan pelaksanaan pembangunan, hal ini disebabkan oleh lambannya dalam pelaksanaan pembangunan dan yang sisanya sebanyak 45 responden dengan persentase 52% termasuk dalam kategori “Tidak Baik” dalam artian waktu yang ditargetkan tidak sesuai dengan pelaksanaannya, karena waktu

yang sudah ditentukan itu tidak sesuai dengan bentuk bangunan yang dilaksanakan.

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa target waktu dalam pelaksanaan pembangunan tidak berjalan dengan baik, hal ini bisa dilihat dari jawaban responden terbanyak adalah tidak baik sebanyak 45 orang dengan persentase 52%.

Hal ini juga berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Desa Bapak Kadri : “Dalam perencanaan pembangunan, pihak-pihak terkait itu memang sudah melakukan target, tetapi terkadang dalam waktu pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Hal ini sering kali terjadi karena tenaga kerja yang dipilih itu kurang profesional atau lambat dalam pelaksanaannya, dan bisa juga dari biayanya, dll. (Wawancara : 15 Mei 2012)

## **2. Waktu Mulai Dan Waktu Berakhir**

Selain menentukan target, dalam pelaksanaan pembangunan juga harus ditentukan kapan waktu mulai dan kapan berakhir. Untuk mengetahui waktu dalam pelaksanaan pembangunan Desa Kerinci Kiri dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel V.12 Tanggapan Responden Tentang Kapan Mulai dan Berakhirnya Waktu dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak**

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	14	16
2	Kurang Baik	40	46
3	Tidak Baik	33	38
<b>Jumlah</b>		<b>87</b>	<b>100</b>

**Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2012**

Berdasarkan tabel V. 12 tersebut di atas, menggambarkan bahwa dari 87 responden, sebanyak 14 responden dengan persentase 16% menyatakan “Sangat Baik” yaitu dalam artian proses pelaksanaan pembangunan sudah menentukan waktu kapan dimulai dan kapan pula berakhirnya.

Sedangkan yang masuk kategori “Kurang Baik” adalah sebanyak 40 responden dengan persentase 46%, yaitu dalam pelaksanaan pembangunan sudah dilakukan kejelasan mengenai waktunya, tapi belum maksimal karena ini dinilai proses pengerjaan yang kurang lambat dan yang sisanya sebanyak 33 responden dengan persentase 38% termasuk dalam kategori “Tidak Baik” dalam artian waktu mulai dan berakhirnya tidak jelas karena terkadang informasi yang tidak sampai kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa target waktu dalam pelaksanaan pembangunan dinilai masih kurang baik, hal ini bisa dilihat dari jawaban responden terbanyak adalah kurang baik sebanyak 40 orang dengan persentase 38%.

### **3. Kualitas Bangunan**

Kualitas bangunan adalah daya tahan dari sebuah bangunan, apakah itu baik ataupun buruk. Dalam pembangunan, mementingkan kualitas itu sangat perlu, agar bangunan bermanfaat yang sangat besar bagi masyarakat. Untuk mengetahui, apakah kualitas bangunan pada pembangunan di Desa Kerinci Kiri ini baik atau tidaknya, bisa dilihat pada jawaban responden pada tabel berikut :

**Tabel V.13 Tanggapan Responden Tentang Kualitas Bangunan dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak**

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	11	13
2	Kurang Baik	39	45
3	Tidak Baik	37	43
<b>Jumlah</b>		<b>87</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2012*

Tabel di atas menggambarkan, bahwa dari 87 responden, sebanyak 11 responden dengan persentase 13% mengatakan “Sangat Baik” dalam menilai kualitas pada bangunan yang dilaksanakan di Desa Kerinci Kiri, dinilai sudah berkualitas.

Sedangkan dengan jumlah 39 responden dengan persentase 45% menilai bangunan “Kurang Baik” dalam kualitasnya, dalam arti kata bangunan yang didirikan belum berkualitas, karena material yang digunakan kurang berkualitas juga. Sedangkan sisanya sebanyak 37 responden dengan persentase 43% mengatakan bangunan yang dilaksanakan tidak berkualitas atau “Tidak Baik”, dalam arti kata bangunan yang berkualitas dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kerinci Kiri tidak bisa terlaksana dalam pembangunan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya sosialisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan keterangan tabel di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan pembangunan untuk bangunan yang berkualitas kurang baik dilaksanakan, pernyataan ini bisa dilihat dari 87 jumlah responden yang menilai “Kurang Baik” berjumlah 39 responden dengan persentase 43%.

#### 4. Kesesuaian Biaya

Selain bangunan yang berkualitas, untuk mengukur keberhasilan suatu pembangunan juga dilihat dari segi biayanya. Kesesuaian biaya adalah adanya kesesuaiannya biaya yang digunakan dengan bangunan yang akan dibangun. Untuk mengetahui kejelasan biaya yang digunakan dalam pembangunan Desa Kerinci Kiri dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel V.14 Tanggapan Responden Tentang Kesesuaian Biaya dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak**

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	8	9
2	Kurang Baik	39	45
3	Tidak Baik	40	43
Jumlah		87	100

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2012*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari 87 jumlah responden yang menjawab “Sangat Baik” mengenai kesesuaian biaya berjumlah 8 responden dengan persentase 9% yaitu kesesuaian biaya yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan sudah terlaksana dengan baik.

Sedangkan yang masuk kategori “Kurang Baik” adalah sebanyak 39 responden dengan persentase 45% yaitu pada pelaksanaan pembangunan, kesesuaian biaya sudah mampu dilaksanakan, namun terkadang hambatannya juga masih sering terjadi yaitu karena bangunan yang dibangun terlalu besar sedangkan dana yang tersedia itu sedikit sehingga pelaksanaan pembangunan jadi tidak selesai dan terbengkalai, dan sisanya sebanyak 40 responden dengan persentase 46% mengatakan “Tidak Baik” dalam artian dalam pelaksanaan pembangunan

kesesuaian biaya tidak baik dalam pelaksanaannya karena perencanaan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan.

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa kesesuaian biaya dalam pelaksanaan pembangunan dinilai “Kurang Baik” dilaksanakan, hal ini berdasarkan pada jawaban responden terbanyak adalah kurang baik dengan jumlah 40 responden dengan persentase 46%.

## 5. Transparansi Biaya

Transparansi biaya adalah adanya kejelasan mengenai biaya yang digunakan untuk pembangunan, baik itu sumber dana maupun dalam penggunaannya. Pada tabel di bawah ini akan dijelaskan mengenai transparansi biaya pada pelaksanaan pembangunan di desa kerinci kiri berdasarkan jawaban dari responden.

**Tabel V.15 Tanggapan Responden Tentang Transparansi Biaya dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak**

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	18	21
2	Kurang Baik	23	26
3	Tidak Baik	46	53
<b>Jumlah</b>		<b>87</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2012*

Berdasarkan pada tabel V.15 di atas, dapat dilihat bahwa dari 87 responden sebanyak 18 responden dengan persentase 21% mengatakan “Sangat Baik” yaitu dalam pelaksanaan pembangunan transparansi biaya sudah bisa terlaksana. Sedangkan 23 responden dengan persentase 26% mengatakan “Kurang Baik” yaitu dalam arti kata transparansi biaya dalam pelaksanaan pembangunan

terkadang masih belum jelas karena kurangnya informasi yang diberikan oleh pihak yang bertanggungjawab dan yang mengatakan “Tidak Baik” 46 responden dengan persentase 53% dengan artian transparansi biaya dalam pembangunan Desa Kerinci Kiri tidak ada transparansi mengenai biayanya, disebabkan tidak adanya kerjasama dari kepala desa kepada masyarakat dan pihak yang terkait.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa transparansi biaya dalam pembangunan Desa Kerinci Kiri dinilai tidak baik dalam pembangunannya, hal ini bisa dilihat dari hasil jawaban responden yang menjawab “Tidak Baik” berjumlah 46 responden dengan 53%.

Hal ini juga didasarkan pada hasil wawancara penulis dengan Kaur Pemerintahan Desa Kerinci Kiri Bapak Aris : “Transparansi biaya itu perlu, guna mengetahui nilai dari bangunan itu, apakah sesuai dengan dana yang dikeluarkan dengan hasil bangunannya apa tidak. Dalam pembangunan di Desa Kerinci Kiri ini mengenai biaya, bisa dibilang tidak jelaslah, memang dalam perencanaan sebelum pelaksanaan pembangunan itu sudah dijelaskan mengenai biaya yang dibutuhkan. Tetapi terkadang adakalanya perencanaan itu tidak sesuai dengan pelaksanaannya, karena kalau sudah masalah biaya, harus benar-benar orang yang bertanggungjawab dan jujur yang mengelolanya. Sehingga pembangunan bisa berjalan dengan baik” (Wawancara : 18 Mei 2012).

Berdasarkan beberapa keterangan mengenai sub indikator di atas, maka dibawah ini akan dijelaskan rekapitulasi tentang manajemen kegiatan. Untuk lebih jelas bisa dilihat pada tabel berikut :



**Tabel V.16 Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Manajemen Kegiatan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak**

No	Daftar Pertanyaan	Kriteria Jawaban			Jumlah
		Sangat Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	
1	Tanggapan responden Tentang Penentuan Target	12	30	45	87
2	Tanggapan responden Tentang Waktu Mulai dan Berakhir	14	40	33	87
3	Tanggapan responden Tentang Kualitas Bangunan	11	39	37	87
4	Tanggapan responden Tentang Kesesuaian Biaya	8	39	40	87
5	Tanggapan responden Tentang Transparansi Biaya	18	23	46	87
<b>Jumlah</b>		<b>63</b>	<b>171</b>	<b>201</b>	<b>435</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>13</b>	<b>34</b>	<b>40</b>	<b>87</b>
<b>Persentase</b>		<b>15</b>	<b>39</b>	<b>46</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2012*

Tanggapan responden tentang penentuan target, waktu dimulai dan waktu berakhir, kualitas bangunan, dan kesesuaian biaya serta transparansi biaya dalam pelaksanaan pembangunan dinilai termasuk dalam kategori “Sangat Baik” sebanyak 13 responden dengan persentase 15%, yang termasuk dalam kategori “Kurang Baik” adalah sebanyak 34 responden dengan persentase 39%, sedangkan kategori “Tidak Baik” adalah sebanyak 40 responden dengan persentase 46% yang menyatakan tidak baik dalam penentuan target, waktu dimulai dan waktu berakhir, kualitas bangunan, dan kesesuaian biaya serta transparansi biaya untuk pelaksanaan pembangunan di Desa Kerinci Kiri.

Jadi dapat dilihat bahwa manajemen kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan ini dinilai tidak baik, karena tidak baiknya manajemen dalam perencanaan dan pelaksanaan.

Hal ini juga berdasarkan hasil pengamatan penulis dilapangan, dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak dinilai tidak baik dalam manajemen kegiatannya. Hal ini juga bisa dilihat dari transparansi biaya, kesesuaian biaya yang digunakan dan penentuan target waktunya. Sebagai salah satu fakta dilapangan bisa dilihat pada pengaspalan jalan poros desa yang tidak optimal dalam pembangunannya, yang sampai sekarang belum selesai dan masih terbengkalai.

### **5.2.3 Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan suatu program pembangunan. Dalam penelitian ini partisipasi masyarakat memiliki beberapa sub indikator, diantaranya adalah ikut dalam musyawarah Desa/Kelurahan, perencanaan kegiatan, pelaksanaan, pengawasan, serta dalam proses serah terima hasil kegiatan. Sub-sub indikator tersebut akan dijelaskan satu persatu dalam tabel dibawah ini, yang diperoleh dari jawaban responden dari hasil penelitian.

#### **1. Keterlibatan Masyarakat Dalam Musyawarah**

Adalah ikut sertanya warga dalam musyawarah desa yang ditetapkan oleh aparat desa. Dibawah ini akan dijelaskan mengenai seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam musyawarah.

**Tabel V.17 Tanggapan Responden Tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Musyawarah dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak**

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	15	17
2	Kurang Baik	39	45
3	Tidak Baik	33	38
<b>Jumlah</b>		<b>87</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2012*

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa jawaban responden tentang keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di kategorikan “Sangat Baik” berjumlah 15 responden dengan persentase 17% yaitu dalam artian bahwa dalam perencanaan pembangunan masyarakat sudah dilibatkan dalam musyawarah, sedangkan kategori “Kurang Baik” berjumlah 39 responden dengan persentase 45% yaitu masyarakat sudah dilibatkan dalam perencanaan tetapi masih belum maksimal, karena masih kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam keikutsertaannya dalam pembangunan. Sedangkan sisanya berjumlah 33 responden dengan persentase 38% mengatakan “Tidak Baik” dalam artian para pembuat keputusan tidak melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, karena disini dinilai tidak adanya kerjasama yang baik antara aparat dengan masyarakat.

Dari keterangan tabel di atas dapat digambarkan, bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dinilai “Kurang Baik”, hal ini bisa dilihat dari jumlah terbanyak responden mengatakan kurang baik sebanyak 39 responden dengan persentase 45%.

Ini berdasarkan juga dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Kerinci Kiri Bapak Ali yang mengemukakan : “ Kami dari pihak aparat sudah berusaha untuk mengajak dan menghimbau kepada masyarakat agar turut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan desa kita, dengan memenuhi undangan yang telah disebarkan. Tetapi sayangnya masih ada juga sebagian dari masyarakat kita ini yang masih belum sadar akan pentingnya keikutsertaannya dalam pembangunan. Jadi dalam keikutsertaan masyarakat ini dinilai masih kurang baiklah.” (Wawancara 18 Mei 2012)

## 2. Perencanaan Kegiatan

Dalam partisipasi masyarakat ini yang dimaksud dengan perencanaan kegiatan adalah keikutsertaan masyarakat dalam musyawarah. Pada tabel di bawah ini diterangkan bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan kegiatan pembangunan Desa Kerinci Kiri, untuk lebih jelas bisa dilihat pada tabel berikut :

**Tabel V.18 Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Perencanaan Kegiatan dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak**

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	18	21
2	Kurang Baik	40	46
3	Tidak Baik	29	33
<b>Jumlah</b>		<b>87</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2012*

Berdasarkan pada tabel V.18 di atas, dapat dilihat bahwa dari 87 responden sebanyak 18 responden dengan persentase 21% mengatakan “Sangat Baik” yaitu masyarakat selalu terlibat dalam pelaksanaan perencanaan kegiatan.

Sedangkan 40 responden dengan persentase 46% mengatakan “Kurang Baik” yaitu dalam arti kata pelaksanaan perencanaan kegiatan dalam pembangunan terkadang adakalanya masyarakat terlibat dan adakalanya tidak karena sebagian masyarakat juga lebih mementingkan kepentingan pribadi dan yang mengatakan “Tidak Baik” 29 responden dengan persentase 33% dengan artian perencanaan kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat tidak terlibat. Hal ini dinilai dari masih rendahnya pendidikan dari sebagian besar masyarakat, sehingga pola pikir tidak berkembang.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa perencanaan kegiatan dalam pembangunan Desa Kerinci Kiri dinilai kurang dalam pelaksanaannya, hal ini bisa dilihat dari hasil jawaban responden yang menjawab “Kurang Baik” berjumlah 40 responden dengan 46%.

### 3. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam partisipasi masyarakat ini adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Kerinci Kiri akan diterangkan pada tabel di bawah ini :

**Tabel V.19 Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak**

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	38	44
2	Kurang Baik	29	33
3	Tidak Baik	20	23
<b>Jumlah</b>		<b>87</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2012*

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari 87 responden sebanyak 38 responden dengan persentase 44% mengatakan “Sangat Baik” yaitu dalam pelaksanaan pembangunan, masyarakat ikut melaksanakan program pembangunan. Sedangkan 29 responden dengan persentase 33% mengatakan “Kurang Baik” yaitu dalam arti hanya sebagian kecil dari masyarakat yang ikut melaksanakan program pembangunan, karena masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadi. Sisanya yang mengatakan “Tidak Baik” adalah sebanyak 20 responden dengan persentase 23% dengan artian masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam pelaksanaannya karena masyarakat dinilai disibukkan dengan pekerjaan yang sudah mereka miliki.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan Desa Kerinci Kiri dinilai sangat baik dalam partisipasinya, hal ini bisa dilihat dari hasil jawaban responden yang menjawab “Sangat Baik” berjumlah 38 responden dengan persentase 44%.

Hal ini berdasarkan pada hasil wawancara penulis dengan salah seorang Aparat Desa Kerinci Kiri yaitu Bapak Boy selaku Kaur Kesra mengemukakan : “Dalam pelaksanaan pembangunan keikutsertaan masyarakat dinilai sangat baik, karena dalam pelaksanaan ini memberi keuntungan bagi masyarakat untuk menambah penghasilan mereka.” (Wawancara 19 Mei 2012).

#### **4. Pengawasan**

Keberhasilan dalam pembangunan desa itu tidak hanya aparat-aparat desa saja yang berperan dalam pengawasan, tetapi peran masyarakat dalam pembangunan juga sangat penting. Hal ini untuk melihat sejauhmana

tanggungjawab pelaksana dalam melaksanakan pembangunan. Untuk mengetahui jawaban responden seberapa besar peran masyarakat dalam pengawasan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel V.20 Tanggapan Responden Tentang Pengawasan dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak**

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	12	14
2	Kurang Baik	38	44
3	Tidak Baik	37	43
<b>Jumlah</b>		<b>87</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2012*

Berdasarkan pada tabel V.20 di atas, menggambarkan bahwa dari 87 responden sebanyak 12 responden dengan persentase 14% mengatakan “Sangat Baik” yaitu dalam pelaksanaan pembangunan pengawasan dari masyarakat sudah bisa terlaksana. Sedangkan 38 responden dengan persentase 44% mengatakan “Kurang Baik” yaitu dalam arti kata pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan terkadang masih belum bisa dilaksanakan oleh masyarakat, ini disebabkan oleh masih kurangnya kepedulian sebagian masyarakat terhadap kepentingan umum dan yang mengatakan “Tidak Baik” 37 responden dengan persentase 43% dengan artian pengawasan dalam pembangunan Desa Kerinci Kiri tidak mampu dilaksanakan, karena masyarakat sibuk dengan kegiatannya sendiri yang dalam hal ini dilihat dari faktor pendidikan dan mata pencaharian.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa transparansi biaya dalam pembangunan Desa Kerinci Kiri dinilai masih kurang baik dalam

pembangunannya, hal ini bisa dilihat dari hasil jawaban responden yang menjawab “Kurang Baik” berjumlah 38 responden dengan 44%.

## 5. Serah Terima

Serah terima adalah penyerahan hasil bangunan kepada masyarakat yang di wakili oleh ketua kelompok masyarakat yang disaksikan juga oleh kepala desa. Untuk mengetahui serah terima pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.21 Tanggapan Responden Tentang Serah Terima Hasil pembangunan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak**

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	13	15
2	Kurang Baik	42	48
3	Tidak Baik	32	37
<b>Jumlah</b>		<b>87</b>	<b>100%</b>

**Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2012**

Berdasarkan pada uraian tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari 87 responden sebanyak 13 responden dengan persentase 15% mengatakan “Sangat Baik” yaitu hasil pembangunan diserahkan terimakan kepada masyarakat sudah terlaksana. Sedangkan 42 responden dengan persentase 48% mengatakan “Kurang Baik” yaitu dalam arti kata serah terima bangunan terkadang dilakukan kadang tidak karena bagian pengurus kurang bertanggungjawab dan yang mengatakan “Tidak Baik” 32 responden dengan persentase 37% dengan artian serah terima hasil bangunan tidak dilaksanakan karena tidak adanya kejelasan dari pengurus kegiatan.



Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa serah terima hasil bangunan dinilai cukup baik dilaksanakan, hal ini bisa dilihat dari hasil jawaban responden yang menjawab “Kurang Baik” berjumlah 42 responden dengan persentase 48%.

Untuk mengetahui hasil dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan pembangunan dapat dilihat pada hasil rekapitulasi pada tabel dibawah ini:

**Tabel V.22 Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak**

No	Daftar Pertanyaan	Kriteria Jawaban			Jumlah
		Sangat Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	
1	Tanggapan Responden Tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Musyawarah	15	39	33	87
2	Tanggapan Responden Tentang Perencanaan Kegiatan	18	40	29	87
3	Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan	38	29	20	87
4	Tanggapan Responden Tentang Pengawasan	12	38	37	87
5	Tanggapan Responden Tentang Serah Terima	13	42	32	87
<b>Jumlah</b>		<b>96</b>	<b>188</b>	<b>151</b>	<b>435</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>19</b>	<b>38</b>	<b>30</b>	<b>87</b>
<b>Persentase</b>		<b>22</b>	<b>44</b>	<b>34</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2012*

Tanggapan responden tentang keterlibatan masyarakat dalam musyawarah, perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan, serta serah terima hasil bangunan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dinilai termasuk dalam kategori “Sangat Baik” sebanyak 19 responden dengan persentase

22%, dalam arti kata partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan baik. Sedangkan yang termasuk dalam kategori “Kurang Baik” adalah sebanyak 38 responden dengan persentase 44%, artinya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan belum maksimal, ini disebabkan oleh faktor pendidikan masyarakat yang masih minim, jadi pola pikirpun tidak berkembang sehingga bersikap masa bodoh. Sedangkan kategori “Tidak Baik” adalah sebanyak 30 responden dengan persentase 34% yang menyatakan tidak baik tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Kerinci Kiri, karena masyarakat dinilai disibukan oleh kegiatannya sehingga lupa akan kewajiban dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak dinilai kurang baik, sebab masih adanya sebagian dari masyarakat yang belum menyadari dan memahami tentang keterlibatannya dalam pembangunan, dan masih bersifat masa bodoh dan kurangnya komunikasi aparat terhadap masyarakat. Sebagai fakta lapangan tentang partisipasi masyarakat ini peneliti lihat pada MCK Mushalla Ubudiyah, disini masyarakat bukannya menjaga tetapi malah mengotorinya.

### **5.3 Rekaputilasi Variabel Penelitian**

Adapun rekapitulasi dari variabel penelitian tentang analisis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa kerinci kiri adalah sebagai berikut :

**Tabel V.23 Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak**

No	Daftar Pertanyaan	Kriteria Jawaban			Jumlah
		Sangat Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	
1	Tanggapan Responden Tentang Ketepatan Sasaran	14 16%	39 45%	34 39%	87
2	Tanggapan Responden Tentang Menejemen Waktu	13 15%	34 39%	40 46%	87
3	Tanggapan Responden Tentang Partisipasi Masyarakat	19 22%	38 44%	30 34%	87
<b>Jumlah</b>		<b>46</b>	<b>111</b>	<b>104</b>	<b>261</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>15</b>	<b>37</b>	<b>35</b>	<b>87</b>
<b>Persentase</b>		<b>17%</b>	<b>43%</b>	<b>40%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2012*

Selanjutnya untuk mengetahui hasil tabulasi dalam menilai jawaban responden pada masing-masing pertanyaan dapat dilakukan dengan cara sesuai ketentuan yang ditetapkan sebagai berikut ini:

$$\text{Sangat Baik} : 3 \times 46 = 138$$

$$\text{Kurang Baik} : 2 \times 111 = 222$$

$$\text{Tidak Baik} : \underline{1 \times 104} = 104$$

$$= \frac{464}{783} \times 100 = 59$$

Persentase rata-rata kualitatif yang diperoleh diatas adalah persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, untuk memahami baik atau tidaknya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan maka akan diberi ukuran menggunakan tiga alternative jawaban yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Sangat Baik	: Apabila jumlah skor yang diperoleh dari jawaban responden berada pada interval 61%-100%
Kurang Baik	: Apabila jumlah skor yang diperoleh dari jawaban responden berada pada interval 31%-60%
Tidak Baik	: Apabila jumlah skor yang diperoleh dari jawaban responden berada pada interval 0%-30%

Maka disimpulkan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak termasuk dalam kategori cukup baik berdasarkan evaluasi jumlah rata-rata responden berada pada interval 31% - 60%. Hal ini dinilai disebabkan oleh masih kurangnya menejemen dari para pemerintah desa, baik dari segi musyawarah yang harus melibatkan masyarakat, maupun mengenai biaya yang digunakan dan masih belum maksimalnya partisipasi dari masyarakat dalam hal pembangunan, yang dalam hal ini bisa dilihat dalam proses perencanaan, misalnya masyarakat sudah diundang dalam suatu musyawarah tetapi tidak mengikuti rapat tersebut, jadi ini bisa jadi salah satu faktornya. Akibat dari masyarakat lebih mementingkan kepentingannya sendiri, dan masih cukup baik pula dalam komunikasi antara aparat dengan masyarakat.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta keterangan dari responden yaitu masyarakat Desa Kerinci Kiri melalui kuesioner dan wawancara langsung, maka pada Bab ini penulis dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian mengenai *Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak*, dapat disimpulkan **“Kurang Baik”** dengan jumlah 59 yang berada pada interval 31% - 60%.

#### **6.2 Saran**

Selain itu sebagai pelengkap penulis juga mengemukakan saran-saran untuk menambah bahan masukan bagi pihak yang membutuhkan dan yang berkepentingan. Adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah :

1. Diharapkan kepada aparat desa, perlunya memperhatikan manajemen kerjanya, membuat perencanaan yang baik dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah dan memberikan perhatian atas kebutuhan masyarakat sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi.
2. Masyarakat juga diharapkan partisipasinya dalam pembangunan ini, baik dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan sebagainya terhadap pelaksanaan pembangunan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara maksimal, karena tanpa partisipasi dari masyarakat pembangunan tidak akan mencapai hasil yang baik.

3. Kepada pemerintah daerah diharapkan lebih memperhatikan lagi mengenai pembangunan desa ini, baik dari segi pengawasan, biaya, maupun yang lainnya yang berhubungan dengan proses pembangunan.
4. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar lebih menguasai lagi dalam hal ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Awang, Azam, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah desa*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010
- Griffin, Ricky, *Manajemen*, Jakarta : Erlangga, 2004
- Kuncoro, Mudrajad, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Jakarta : Erlangga, 2004
- Nurcholis, Hanif, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta : Erlangga, 2011
- Ndraha, Taliziduhu, *Kybernologi*, Jakarta : Rineka Cipta, 2003
- *Kybernologi; Sebuah Scientific Enterprise*, Jakarta: Sirao Credentia Center, 2006
- Rivai, Veithzal, *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*, Jakarta : PT. Gtafindo, 2004
- Riyadi dan Deddy supriyadi Bratakusumah, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004
- Siagian, Sondang P, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000
- Syafiie, Inu Kencana, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jakarta : Bumi Aksara, 2003
- Sule, Erni Tisnawati dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Jakarta : Pernada Media Group, 2005
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : CV. Alfabeta, 2007
- Syaukani, *Perencanaan Daerah di Era Otonom*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007
- Usman, Husaini, *Manajemen*, Yogyakarta : Bumi Aksara, 2011
- Umar, Husein, *Metode Riset Ilmu Administrasi*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004
- Wasistiono, Sadu, *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung: Fokus Media, 2007

Widjaja, Haw, *Pemerintahan Desa dan Administerasi Desa* (Menurut PP No 8 Tahun 2005), Jakarta: Persada, 2002

————— *Otonomi Desa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

————— *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta : 2007

————— *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, Rajawali Pers, Jakarta : 2009

Widya, Wicaksono Kristian, *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2006

Zuriah, Nurul, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, Malang, Bumi Aksara, 2005

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang “*Pemerintah Daerah*”

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Hibah Khusus Keuangan Kepada Kelompok Masyarakat Desa/Kelurah  
(*Speccific Block Grant*) Tahun Anggaran 2011